



Kinerja BPOM

Dalam Angka

Triwulan II Tahun 2024



KINERJA BPOM DALAM ANGKA

TRIWULAN II TAHUN 2024

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 93.751 NIE, pemeriksaan terhadap 16.707 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 31.687 sampel, 138 perkara, dan 275 kegiatan pelaksanaan KIE.

Di tengah dinamika global dan tantangan pengawasan yang semakin kompleks, termasuk isu-isu krusial seperti maraknya peredaran obat ilegal dan pangan yang tidak aman, BPOM semakin memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum. Kasus-kasus besar seperti peredaran obat-obatan yang mengandung zat berbahaya dan skandal impor pangan ilegal menunjukkan betapa pentingnya peran BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat. Dengan inovasi teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, BPOM berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. BPOM juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendukung pelaku usaha, termasuk UMKM, agar dapat menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 15 Agustus 2024
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, M.Pharm., Apt.

Daftar Isi

SAMBUTAN BPOM RI	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
HIGHLIGHT	1
BAB 1 Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
BAB 2 Penindakan di Bidang Obat dan Makanan	11
BAB 3 Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman	15
BAB 4 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	19
BAB 5 Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan	21
BAB 6 Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat	23
BAB 7 Digitalisasi Pelayanan Publik	33
BAB 8 Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan	39
BAB 9 Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	43
BAB 10 Kerjasama Internasional	49
BAB 11 Sumber Daya Manusia	59
BAB 12 Realisasi Anggaran Sampai dengan Juni 2024	63
BAB 13 Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	65
Penutup	65
Lampiran	66

Daftar Gambar

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	6
Gambar 5.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan.....	9
Gambar 6.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan.....	9
Gambar 7.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan.....	10
Gambar 8.	Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan.....	11
Gambar 9.	Hasil Operasi Intelijen s.d Triwulan II Tahun 2024	12
Gambar 10.	Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan II Tahun 2024.....	13
Gambar 11.	Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan II Tahun 2024	14
Gambar 12.	Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan II Tahun 2024.....	23
Gambar 13.	Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan II tahun 2024.....	24
Gambar 14.	Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan II Tahun 2024	24
Gambar 15.	Sebaran Pemberitaan Isu Obat dan Makanan di Media s.d Triwulan II Tahun 2024.....	25
Gambar 16.	Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d Triwulan II Tahun 2024.....	25
Gambar 17.	Pertumbuhan Audiens Berdasarkan Platform s.d Triwulan II Tahun 2024.....	26
Gambar 18.	Engagement Per Platform s.dTriwulan II Tahun 2024	26
Gambar 19.	<i>Top Engagement Content</i> terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d Triwulan II Tahun 2024	27
Gambar 20.	Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.5/No.4/2023	27
Gambar 21.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan II Tahun 2024	28
Gambar 22.	Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik pada Triwulan II Tahun 2024.....	29
Gambar 23.	Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi	30
Gambar 24.	Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM	30
Gambar 25.	Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi	31
Gambar 26.	Topik Layanan Infomasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM	31
Gambar 27.	Fitur BPOM <i>Mobile</i>	33
Gambar 28.	Aktivitas BPOM <i>Mobile</i> Tahun 2018 s.d Triwulan II Tahun 2024	34
Gambar 29.	Aktivitas BPOM <i>Mobile</i> Triwulan II Tahun 2024	34
Gambar 30.	Tampilan <i>Login</i> Portal SIPT.....	36
Gambar 31.	Tampilan Menu Login pada Aplikasi SMART POM	37
Gambar 32.	Dashboard Data Pengajuan pada Layanan <i>Helpdesk</i> Pusdatin	38
Gambar 33.	Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan II Tahun 2024	41
Gambar 34.	Realisasi Anggaran s.d Juni 2024.....	63

Daftar Tabel

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target).....	7
Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)	8
Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping.....	10
Tabel 4. Hasil Tinjau Ulang Manual Sistem Manajemen Terintegrasi Badan POM	46
Tabel 5. Hasil Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi LSP BPOM s.d. Triwulan II Tahun 2024	59
Tabel 6. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi PENKOMTEK s.d. Triwulan II Tahun 2024	60
Tabel 7. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi SIPENATEMANKU s.d. Triwulan II Tahun 2024.....	60
Tabel 8. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi IDEAS s.d. Triwulan II Tahun 2024	62

Highlight

BPOM Apresiasi Pemda dan Sekolah atas Peran Aktif pada Program Germas SAPA



Jakarta, Jumat (21/6/2024) “Makanan merupakan kebutuhan masyarakat paling dasar yang dikonsumsi setiap hari. Tentunya keamanan pangan ini menjadi hal yang sangat penting sehingga kita perlu terus menggaungkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman [Germas SAPA] karena kita ingin membentuk manusia Indonesia yang unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Pernyataan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia saat memberikan sambutan pada Pertemuan Teknis Germas SAPA. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan daerah, para nominator penerima penghargaan, serta lintas sektor lainnya ini digelar dalam upaya mewujudkan keamanan pangan nasional.

Agenda lainnya dalam pertemuan teknis pada hari ini adalah forum dialog bersama perwakilan daerah yang memiliki *success story* dalam melaksanakan program Germas SAPA. Salah satunya adalah Sekretaris Desa Karang Bunga, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan Agus Supriadi. Dengan diskusi aktif yang tercipta dalam forum ini, diharapkan dapat semakin memperkaya konsep baru yang dikembangkan dalam program Germas SAPA. BPOM juga berharap agar seluruh pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat mereplikasi program Germas SAPA secara mandiri dan berkelanjutan, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kolaborasi Pemangku Kepentingan Tertibkan Skincare Etiket Biru Tak Sesuai Ketentuan



Jakarta, Senin (06/05/2024) “Hari ini, kita sama-sama mempunyai tujuan menertibkan peredaran *skincare* beretiket biru pada klinik kecantikan. Kita sepakat keamanan penggunaan kosmetik harus dijaga.” tegas Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia. Hal tersebut diungkapkan kepada undangan yang hadir pada Forum Koordinasi Penertiban *skincare* Beretiket Biru yang Tidak Sesuai Ketentuan.

Etiket biru adalah istilah yang digunakan untuk sediaan farmasi yang dibuat secara racikan. Sementara itu, *skincare* bertiket biru merupakan istilah untuk produk perawatan kulit yang mengandung bahan obat keras dan dibuat sebagai produk racikan. Dengan kata lain, produk ini bersifat personal, khusus disiapkan untuk pasien yang telah berkonsultasi dengan dokter yang menuliskan resep berdasarkan diagnosis. Namun belakangan ini, BPOM menemukan peredaran *skincare* beretiket biru secara tidak bertanggung jawab di tengah masyarakat tanpa ada pengawasan atau peresepan dari dokter. Karena itu, BPOM menyelenggarakan forum koordinasi ini untuk memberantas peredaran *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan. Mengusung tema BERSERU (Bersama Tertibkan Skincare Beretiket Biru), forum ini berupaya mewujudkan kolaborasi bersama lintas sektor terkait dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini juga termasuk kegiatan penindakan untuk penegakan hukum terhadap peredaran *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan.

Konsolidasi Implementasi Perluasan Layanan Kesehatan Nasional



Jakarta, Kamis (25/04/2024). Dinamika penyebaran informasi saat ini semakin kompleks. Salah satu anomali yang terlihat dalam penyebaran informasi adalah ketika informasi yang bersifat baik dan benar kurang diminati dibandingkan informasi yang bersifat bias, menyenangkan, dan bahkan tidak jarang memberikan informasi yang bersifat negatif. Menyikapi hal tersebut, BPOM sebagai salah satu lembaga publik perlu terus mengupayakan transparansi informasi publik dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi publik di bidang obat dan makanan.

BPOM tentunya tidak sendirian dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik ini. Perlu adanya kolaborasi yang kuat dengan lintas sektor untuk mendorong keterbukaan informasi publik hingga ke pelosok negeri. Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, BPOM kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Rakontek PPID) Tahun 2024

Rakontek PPID kali ini mengangkat tema “Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Hingga ke Pelosok Negeri”. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid (offline dan online) dan diikuti oleh lebih kurang 150 peserta yang berasal dari tim PPID internal di BPOM pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT) serta perwakilan PPID dari kementerian/lembaga lain.



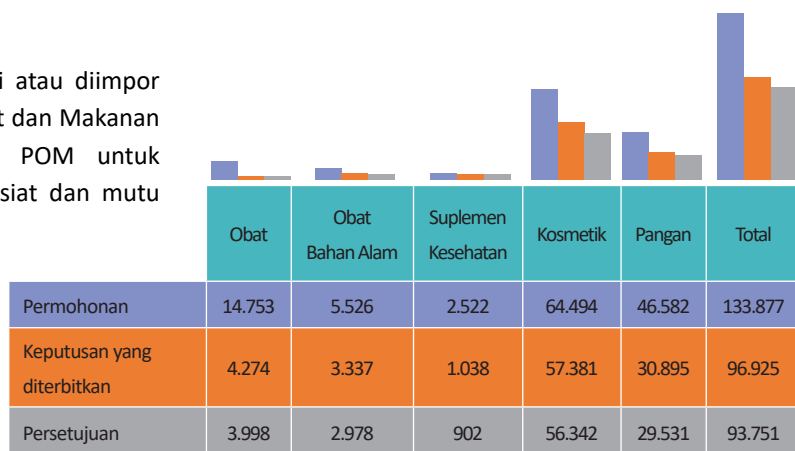
BAB 1

Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

Pengawasan *Pre-market*

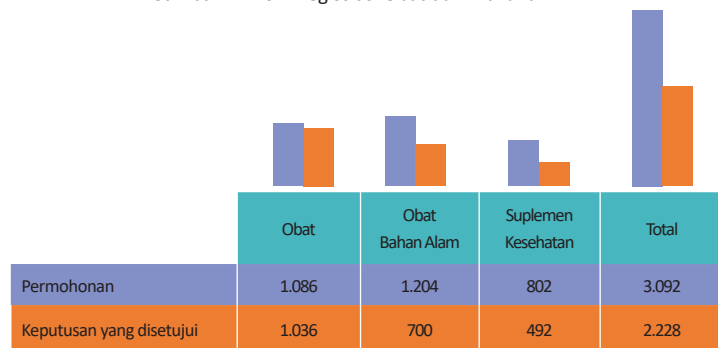
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, telah diterbitkan 96.925 keputusan dan 93.751 persetujuan izin edar dari 133.877 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dari 3.092 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 2.228 (72,06%) iklan.



Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

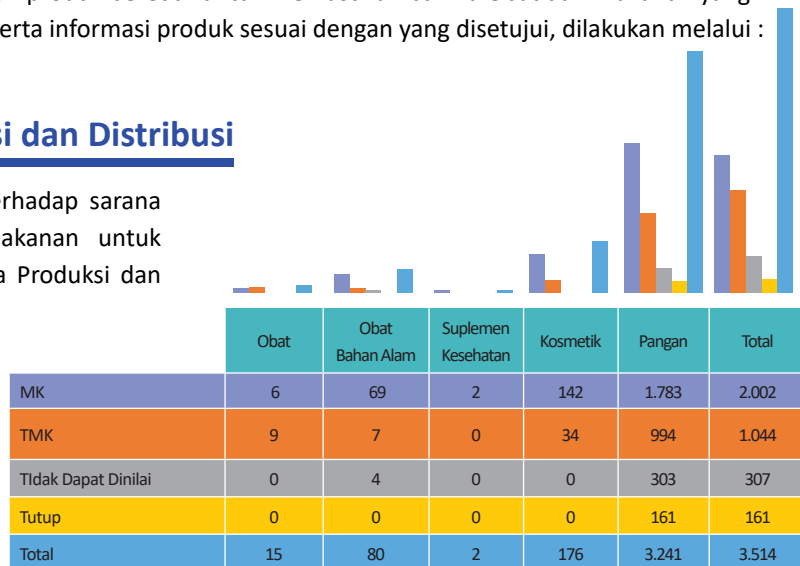
Pengawasan *Post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

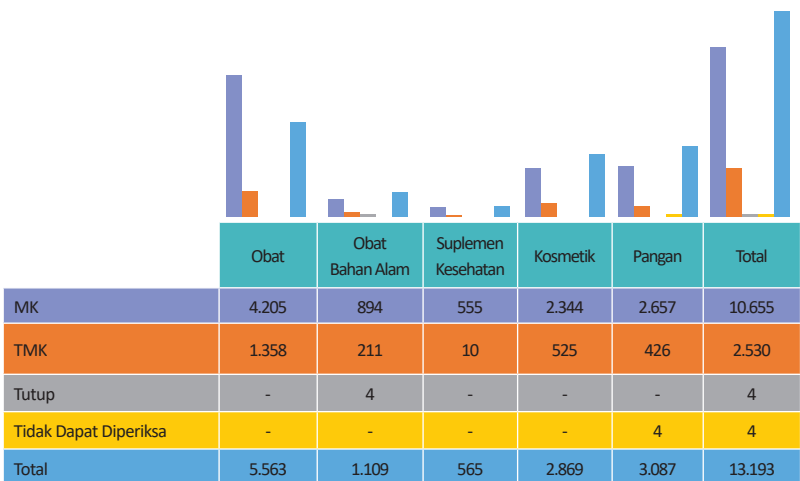
Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah diperiksa sebanyak 3.514 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 1.044 (29,71%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah diperiksa sebanyak 13.193 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 2.530 (19,18%) sarana adalah TMK.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Keterangan
 TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan
 MK : Memenuhi Ketentuan

Sampling dan Pengujian Laboratorium

a. Targeted

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Target)

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Illegal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Tageted	1.800	2	-	-	10	1.798	1.138	1.105	33	35	660	1.140
Obat Bahan Alam	Tageted	1.978	-	-	2	63	1.976	1.376	1.254	122	124	600	1.378
Kuasi	Tageted	137	-	-	-	3	137	102	99	3	3	35	102
Suplemen Kesehatan	Tageted	573	-	-	3	3	570	401	380	21	24	169	404
Kosmetik	Tageted	4.015	10	-	-	253	4.005	2.947	2.638	309	319	1.058	2.957
Rokok	Tageted	-					-	-	-	-	-	-	-
Pangan	Tageted	2.492	-	-	2	290	2.490	1.666	1.448	218	220	824	1.668

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)
BB/BPOM Triwulan II 2024

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dari 10.995 sampel *targeted* yang disampling terdapat 7.649 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, Dimana 706 (9,23%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa izin Edar

b. Random

Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Illegal/ Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Random	7.704	-	-	1	111	7.703	5.491	5.369	122	123	2.212	5.492
Obat Bahan Alam	Random	5.200	-	-	4	179	5.196	3.833	3.475	358	362	1.363	3.837
Kuasi	Random	318	-	-	-	3	318	259	257	2	2	59	259
Suplemen Kesehatan	Random	1.467	-	-	3	16	1.464	1.102	1.020	82	85	362	1.105
Kosmetik	Random	9.686	-	-	5	436	9.681	6.858	6.399	459	464	2.823	6.863
Pangan	Random	9.967	-	-	4	744	9.963	6.478	5.910	568	572	3.485	6.482

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)
BB/BPOM Triwulan II 2024

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dari 34.342 sampel random yang disampling terdapat 24.038 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 1.591 (6,62%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:

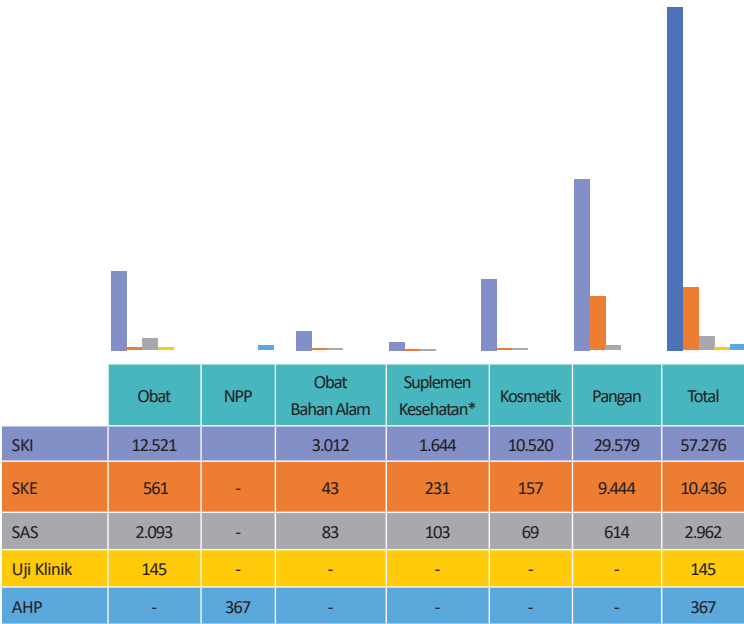
MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

TIE = Tanpa izin Edar

Sertifikasi

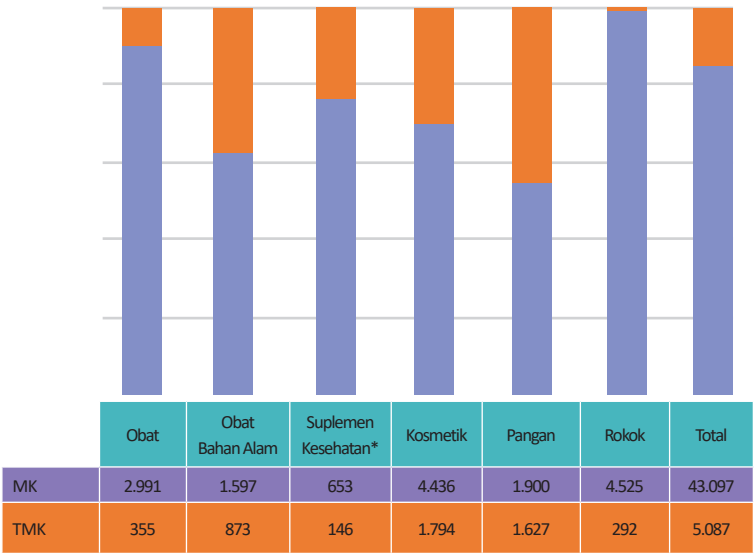
Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (Special Access Scheme), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah diterbitkan 57.276 SKI, 10.436 SKE, 2.962 SAS, 145 Uji Klinik, dan 367 AHP Obat dan Makanan.



Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Pengawasan Iklan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dari 48.184 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 5.087 (10,56%) iklan tidak memenuhi ketentuan.



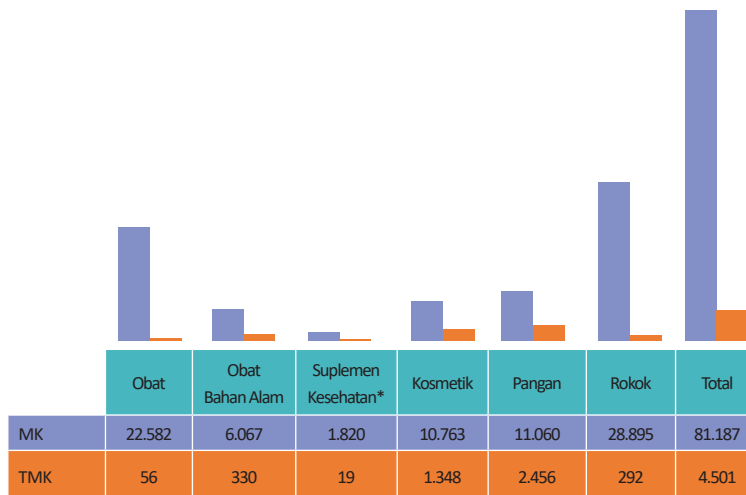
Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

* Termasuk Kuasi

Pengawasan Label

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dari 85.688 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 4.501 atau sekitar 5,54% label tidak memenuhi ketentuan.

* Termasuk Kuasi



Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping

	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindakan lanjut	%
Obat	7.042	5.666	80,46
Obat Bahan Alam	14	14	100,00
Suplemen Kesehatan	24	24	100,00
Kosmetik	300	292	97,33



Penggunaan Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

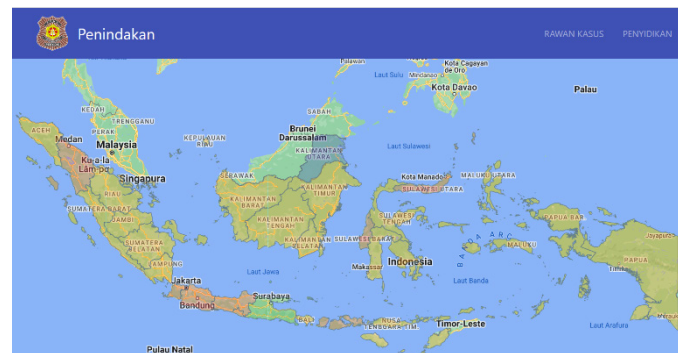
- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

BAB 2

Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

1. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta kerawanan kejahatan, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

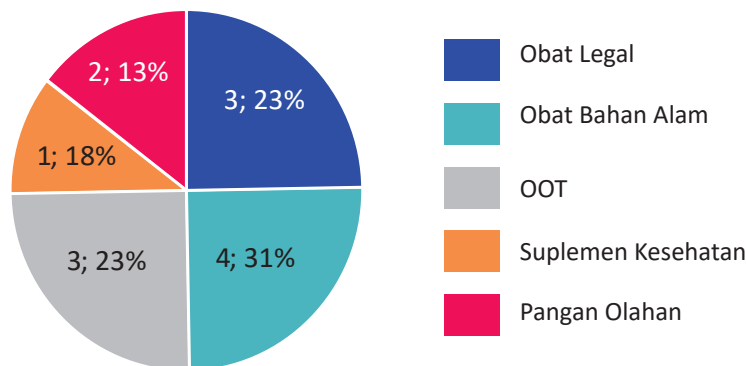


Gambar 8. Peta Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 2.163 kasus yang terdiri dari 797 kasus terkait obat, 381 kasus terkait obat tradisional, 115 kasus suplemen kesehatan, 686 kasus terkait kosmetik dan 184 kasus terkait komoditi pangan.

2. Hasil Kegiatan dan Operasi Intelijen

Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya Badan POM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik pada tahap *premarket* maupun *postmarket*. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, NAPPZA, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan saksi administrasi maupun *projusticia*.

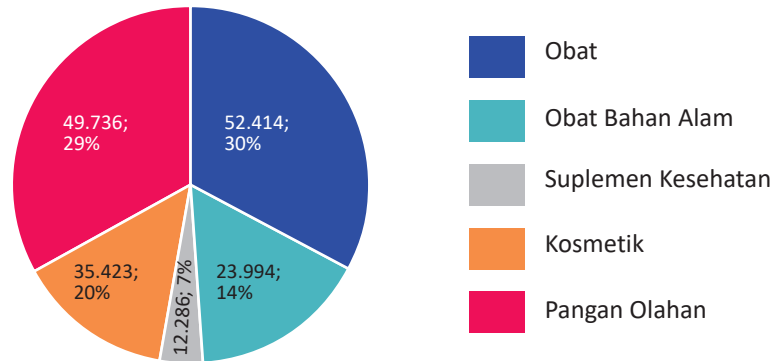


Gambar 9. Hasil Operasi Intelijen s.d Triwulan II Tahun 2024

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, telah disusun 119 laporan informasi dari pelaksanaan kegiatan intelijen dan 14 laporan intelijen dari pelaksanaan operasi intelijen. Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen tersebut telah dihasilkan 13 rekomendasi intelijen dengan 3 rekomendasi terkait kasus peredaran obat ilegal, 4 rekomendasi terkait kasus obat tradisional ilegal, 3 rekomendasi kasus obat-obat tertentu, 1 rekomendasi kasus suplemen kesehatan serta 2 rekomendasi terkait kasus pangan olahan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi.

3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan II Tahun 2024

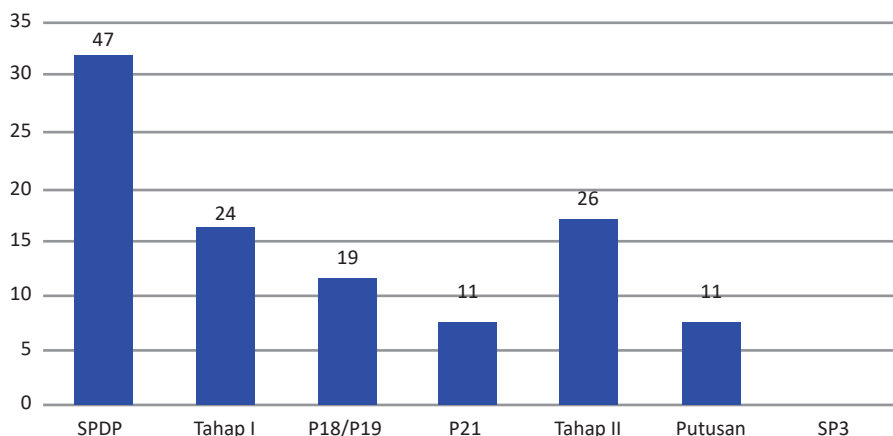
Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan II tahun 2024, ditemukan 173.853 *link* yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



4. Hasil Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 138 perkara. Sebanyak 47 perkara masih dalam tahap SPDP, 24 perkara pada tahap I, 19 perkara pada tahap P18/19, 11 perkara pada tahap P21, 26 perkara pada tahap II dan 11 perkara yang mendapatkan putusan pengadilan.



Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia s.d. Triwulan II Tahun 2024



BAB 3

Penyusunan Peraturan/Standar/Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun peraturan/standar/pedoman di bidang Obat dan Makanan.

Obat

Pada tahun 2024, terdapat 17 peraturan/standar/pedoman yang disusun oleh Badan POM. Daftar 17 peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Badan POM No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Obat Berbasis Sel Manusia (45%).
2. Revisi Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2015 tentang Obat Pengembangan Baru (45%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No. 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin (75%).
4. Revisi Peraturan Badan POM tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (65%).
5. Revisi Peraturan Badan POM No. 30 Tahun 2022 tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*) (100%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (substansi revisi Aneks 1 Pembuatan Produk Steril) (75%).
7. Revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 10 Tahun 2017 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Unit Transfusi Darah dan Pusat Plasmaferesis (95%).
8. Buku Tanya Jawab terkait Standar Mutu Obat dan Bahan Obat (25%).
9. Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pengkajian Keamanan dan/atau Mutu Obat dan Bahan Obat (55%).
10. Peraturan Badan POM tentang Pedoman Verifikasi Metode Analisis Obat dan Bahan Obat (65%).
11. Standard Mutu Obat Baru (75%).
12. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM Pusat Farmakovigilans/Monitoring Efek Samping Obat Nasional (95%).
13. Rancangan Keputusan Badan POM tentang Standar Informasi Obat (70%).
14. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Tata Cara Penilaian Pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik di Fasilitas Produksi dan Cara Distribusi Obat yang Baik di Fasilitas Distribusi (75%).

15. Revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang Pengawasan Produk Tembakau yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan dalam Iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan Promosi (15%).
16. Revisi Keputusan Kepala Badan POM No. 65 Tahun 2022 tentang Daftar Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi (55%).
17. Revisi Keputusan Kepala Badan POM No. 148 Tahun 2023 tentang Pedoman Cara Regulatori Obat yang Baik dan Penyusunan Tools Monitoring serta Evaluasi Implementasinya (45%).

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat 10 peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2024. Daftar 10 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Revisi Peraturan Badan POM No. 14 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) (60%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Penerapan Program Manajemen Risiko di Fasilitas Industri Obat Bahan Alam (40%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Kajian Risiko terhadap Bahan Tambahan yang Digunakan dalam Sediaan Tertentu Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (40%).
4. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (90%).
5. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (60%).
6. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (60%).
7. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Uji Klinik (60%).
8. Revisi Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan (60%).
9. Revisi Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika (60%).
10. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM No. 32 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (100%).

Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah diselesaikan 87 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 hari kerja). Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

Pangan

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang disusun oleh Badan POM pada tahun 2024. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam rangka Antisipasi *Emerging Issue* melalui Penelaahan Regulasi Cemarkan Pangan Olahan di Berbagai Negara (50%).
2. Kajian terhadap Penjualan Pangan Curah melalui Depot (50%).
3. Pedoman Penetapan Masa Simpan untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (50%).
4. Pedoman Implementasi Peraturan Badan POM terkait Kemasan Pangan (30%).
5. Amandemen Peraturan Badan POM No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan (83,33%).
6. Revisi Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi (38,46%).
7. Revisi Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2020 tentang Pangan Keperluan Gizi Khusus (64,10%).
8. Amandemen Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2021 tentang Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis (70%).
9. Amandemen Peraturan Badan POM No. 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan (50%).
10. Revisi Peraturan Badan POM No. 31 Tahun 2018 Label Pangan Olahan (60%).
11. Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan (20%).

Badan POM juga menyusun rekomendasi kebijakan terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah diselesaikan 99 rekomendasi kebijakan dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu.

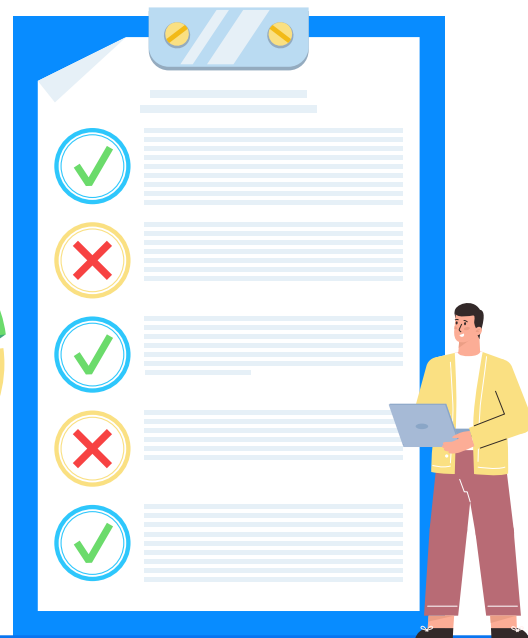


BAB 4

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Pada tahun 2024 terdapat 7 topik riset dan kajian yang dilaksanakan oleh Badan POM. Daftar riset dan kajian beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (50%).
2. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia *Risk Assessment* (95%).
3. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 (50%).
4. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Badan POM Tahun 2024 (60%).
5. Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 (50%).
6. Analisis Efektivitas Implementasi Konsep Regionalisasi Laboratorium Badan POM (56%).
7. Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2024 dan Penyusunan Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun 2025 (40%).



BAB 5

Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

1. Metode Analisis yang Dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar sesuai dengan persyaratan terkini. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah dikembangkan 71 metode analisis.

2. Baku Pembanding yang Dikembangkan

Pengembangan baku pembanding dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan II tahun 2024 telah dikembangkan 37 baku pembanding.

3. Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

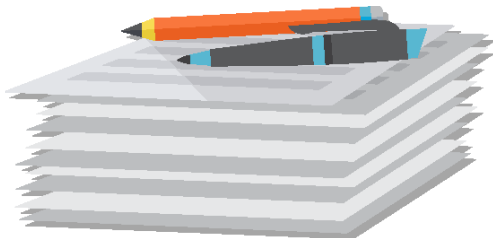
Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, terdapat 829 sampel yang telah selesai uji dan memenuhi ketentuan *timeline*.

4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, telah dilakukan kalibrasi terhadap 1.896 peralatan laboratorium Obat dan Makanan.

5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan

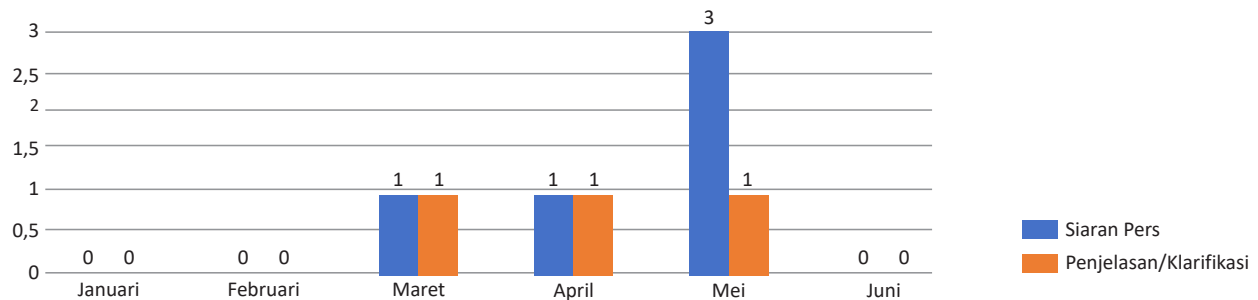
Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, *workshop*, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan Badan POM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/keahlian. Pada tahun 2024, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 14 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, Badan POM telah berpartisipasi dalam 13 jejaring laboratorium.



BAB 6

Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

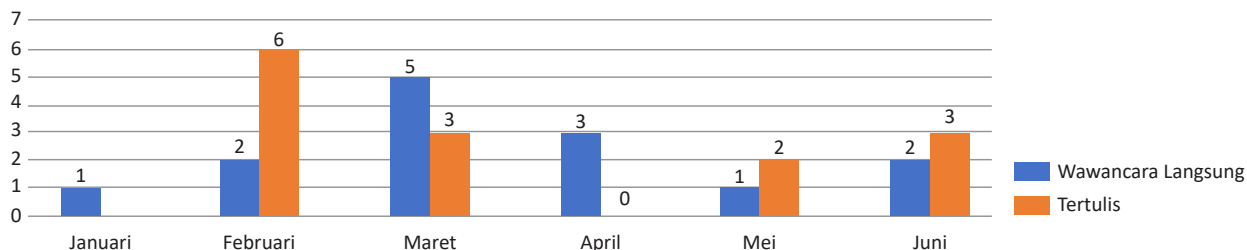
Sampai dengan triwulan II tahun 2024, Badan POM telah menerbitkan 5 siaran pers dan 2 penjelasan/klarifikasi terkait isu Obat dan Makanan. Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas antara lain obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi dipublikasikan melalui *website* dan media sosial Badan POM.



Gambar 12. Jumlah Publikasi Siaran Pers/Penjelasan/Klarifikasi Badan POM s.d. Triwulan II Tahun 2024

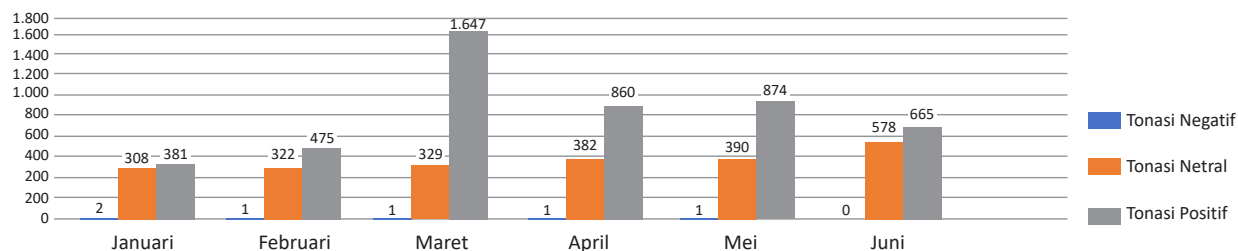


Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara, *talkshow* dan pemberian jawaban tertulis. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, Badan POM menerima 39 permohonan wawancara dari media. Sebanyak 28 permohonan sudah ditindaklanjuti dengan rincian 13 wawancara langsung dan 15 jawaban tertulis.



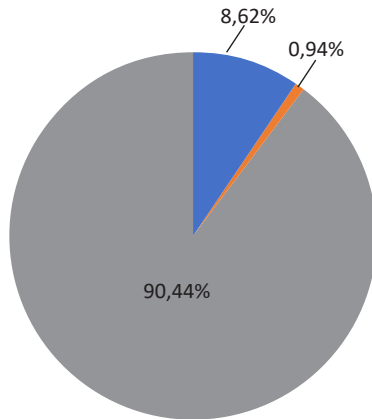
Gambar 13. Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan II tahun 2024

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, terdapat 7.218 pemberitaan terkait Obat dan Makanan secara umum maupun Badan POM. Dari seluruh pemberitaan tersebut, sejumlah 67,91% bertonasi positif (4.902 berita), 31,99% bertonasi netral (2.309 berita), dan 0,10% bertonasi negatif (7 berita). Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik Obat dan Makanan yang tidak mengutip Badan POM.

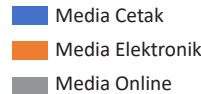


Gambar 14. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d Triwulan II Tahun 2024

Tingginya pemberitaan bertonasi positif pada bulan Maret disebabkan oleh pemberitaan terkait pemusnahan 1 ton roti *milk bun* oleh Badan POM dan Bea Cukai. Pada bulan yang sama, Badan POM melalui Balai Besar/Balai/Loka POM mulai intensif melakukan pengawasan pangan selama Ramadan dan jelang Idulfitri 2024. Pemberitaan bertonasi negatif terkait dengan kritik terhadap pengawasan Obat dan Makanan di Manado serta opini dari Dinas Kesehatan Lampung mengenai mahal nya sertifikasi Badan POM bagi UMKM.



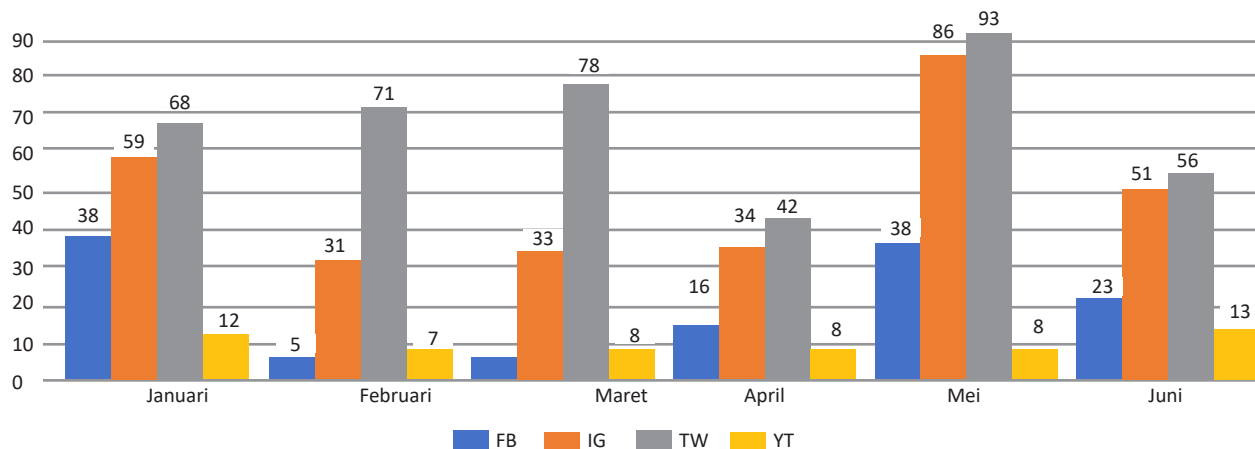
Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Obat dan Makanan serta Badan POM hampir seluruhnya berasal dari media *online* sebesar 90,44% (6.528 berita), sedangkan media cetak sebesar 8,62% (622 berita) dan media elektronik 0,94% (68 berita).



Gambar 15. Sebaran Pemberitaan Isu Obat dan Makanan di Media s.d Triwulan II Tahun 2024

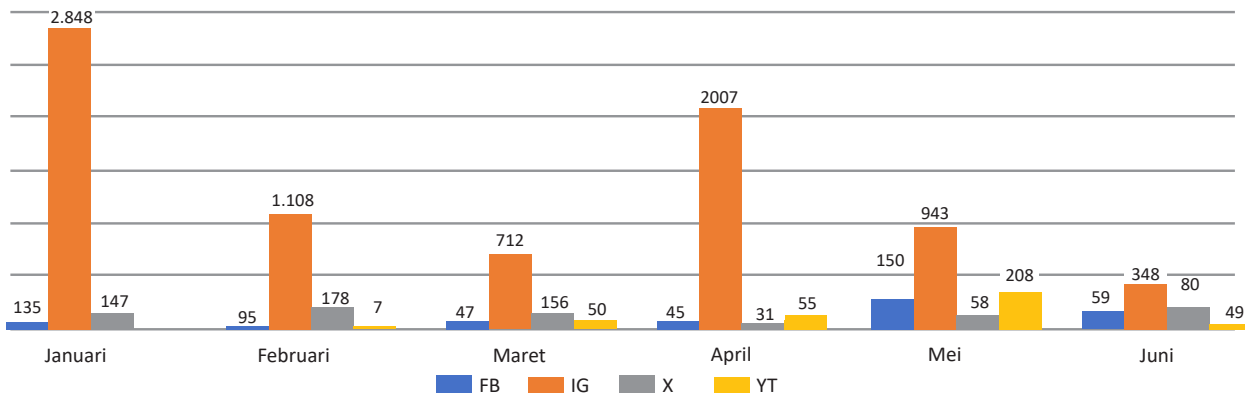
Pada triwulan II tahun 2024, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 *platform* media sosial yaitu Facebook, Instagram, X, dan Youtube memiliki rata-rata 2-3 unggahan per hari. *Platform X* merupakan *platform* dengan aktivitas tertinggi yaitu sebanyak 191 *tweets* dibandingkan dengan 3 *platform* media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 171 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 77 unggahan, serta Youtube sebanyak 29 unggahan.

Secara garis besar, total unggahan selama triwulan II pada berbagai *platform* adalah 878 konten, dengan rincian 177 unggahan di bulan Januari, 114 unggahan di bulan Februari, 119 unggahan di bulan Maret, 100 unggahan di bulan April, 225 unggahan di bulan Mei, dan 143 unggahan di bulan Juni. Rincian jumlah unggahan s.d triwulan II di berbagai *platform* sebagai berikut:



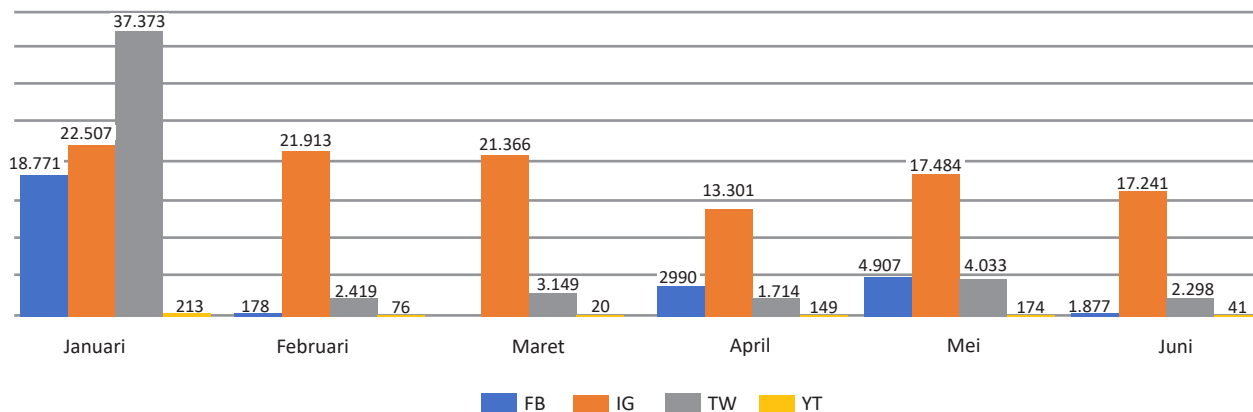
Gambar 16. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d Triwulan II Tahun 2024

Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung pada triwulan II terhadap 4 *platform* media sosial terpantau fluktuatif. Instagram merupakan *platform* dengan total audiens tertinggi pada triwulan II ini dengan jumlah 3.298 audiens, sementara di peringkat kedua *platform* Youtube dengan jumlah 312 audiens, dilanjutkan dengan Facebook dengan jumlah 254 audiens, dan dengan 169 audiens. Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada bulan April yaitu 2.138 audiens, disusul bulan Mei sebanyak 1.359 audiens dan bulan Juni sebanyak 536 audiens.



Gambar 17. Pertumbuhan Audiens Berdasarkan Platform s.d Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II, *engagement* pada setiap *platform* cenderung fluktuatif. *Engagement* tertinggi terjadi pada bulan Mei, dengan jumlah 26.598, diikuti bulan Juni 21,457, dan bulan April sebesar 18.154. *Engagement* tertinggi terjadi pada bulan Mei karena banyak konten yang menggunakan *trend jacking*, seperti konten “Waspada Jamu Berbahaya”, “Dear Jamu”, dan “Amankan Obat Tetes Herbal” serta konten penjelasan publik tentang keamanan vaksin AstraZeneca.



Gambar 18. Engagement Per Platform s.d Triwulan II Tahun 2024

Top engagement content terkait Badan POM di keempat platform pada triwulan II dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 19. Top Engagement Content terkait Badan POM pada Platform Facebook, X, Instagram dan Youtube s.d Triwulan II Tahun 2024

Pada triwulan II tahun 2024, Badan POM telah menerbitkan Majalah POM (MaPOM) Vol.6/No.1/2024 dengan mengusung tema utama Perkuat Jejaring Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Tema ini dipilih untuk merangkum perjalanan Badan POM yang tengah memperkuat jejaring pengawasan di daerah dengan diresmikannya tiga Loka POM dan peningkatan status delapan Loka POM menjadi Balai POM. Pembentukan dan penguatan jaringan pengawasan obat dan makanan di daerah juga diharapkan mampu mempererat sinergi lintas sektor terkait.

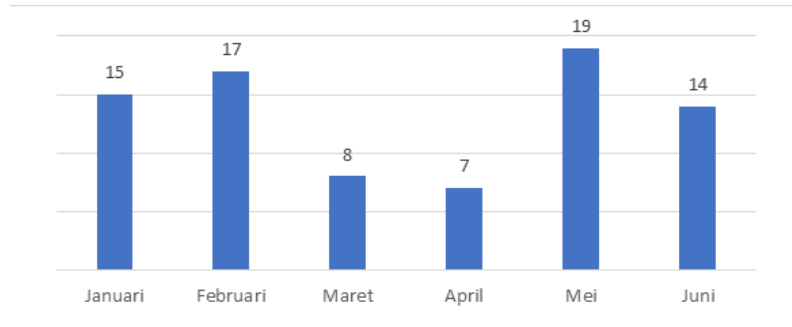


Gambar 20. Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM) Vol.5/No.4/2023



Gambar 21. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d Triwulan II Tahun 2024

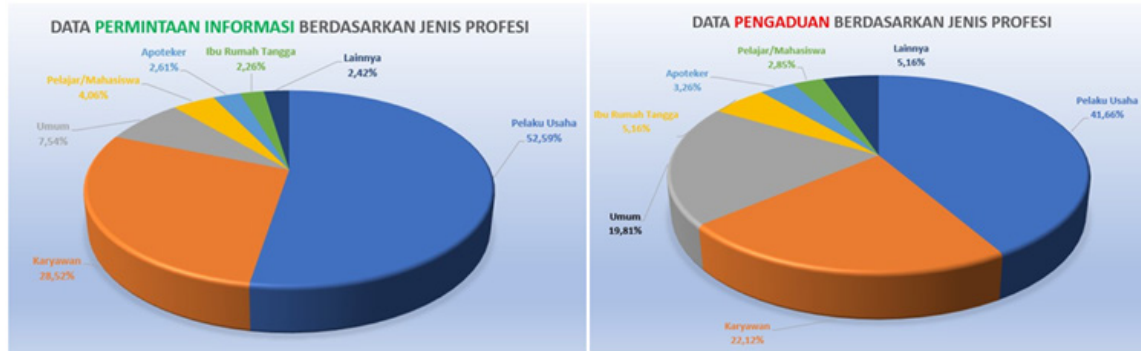
Pada triwulan II tahun 2024, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan POM telah menerima 80 permintaan informasi dari pemohon informasi publik. Profil pemohon informasi berdasarkan profesi yaitu pelajar/mahasiswa (75%), karyawan (12,5%), apoteker (2,5%), sarjana hukum (1,25%), LSM (1,25%), dan masyarakat umum lainnya (7,5%).



Gambar 22. Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik pada Triwulan II Tahun 2024

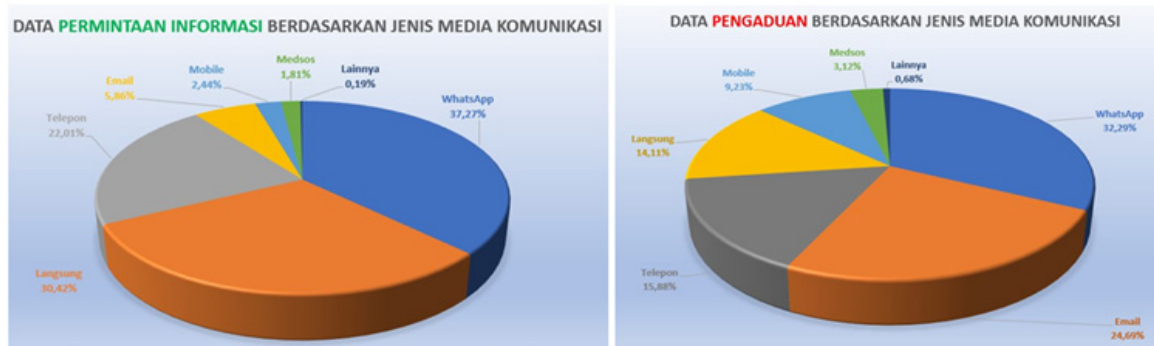
Dari 80 permintaan informasi publik yang diterima oleh Badan POM, sebanyak 70 (87,5%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 8 (10%) permintaan informasi dikabulkan sebagian, dan 2 (2,5%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klafisikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian yaitu tidak lebih dari 17 hari kerja dengan rata-rata waktu penyelesaian adalah 3,93 hari kerja.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat dan layanan informasi Obat dan Makanan sampai dengan triwulan II tahun 2024, Badan POM telah melaksanakan layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui ULPK Pusat dan 76 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta *Contact Center* HALOBPOM sebanyak 22.338 layanan, terdiri dari 21.601 (96,70%) layanan permintaan informasi dan 737 (3,30%) layanan pengaduan.



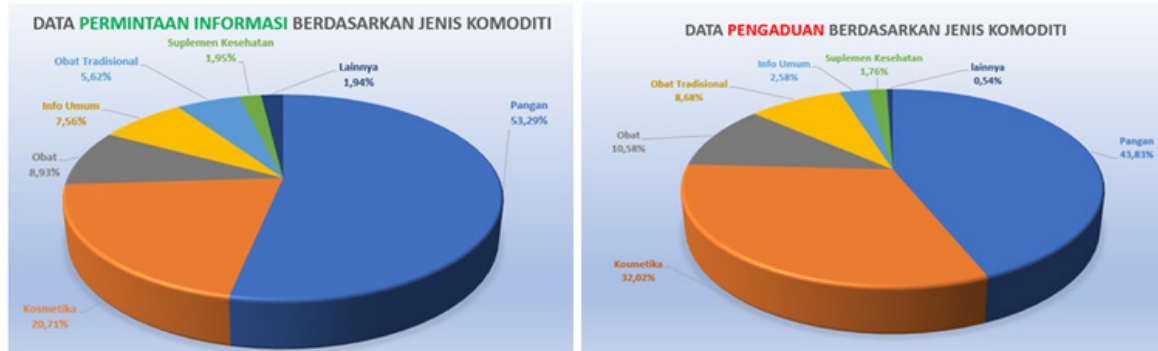
Gambar 23. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 11.361 (52,59%) layanan dan karyawan sebanyak 6.161 (28,52%) layanan, sementara untuk layanan pengaduan sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 307 (41,66%) layanan dan karyawan sebanyak 163 (22,12%) layanan.



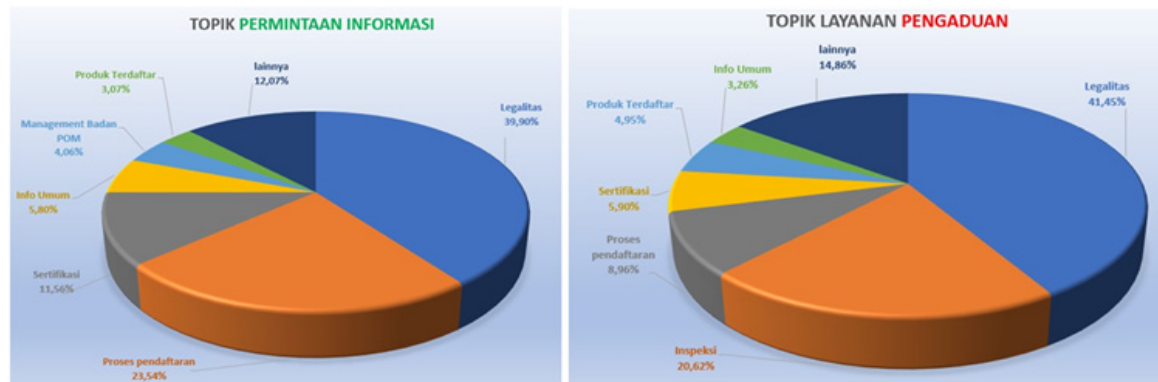
Gambar 24. Profil Media Permintaan Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu aplikasi *WhatsApp* sebanyak 8.050 (37,27%) layanan dan langsung sebanyak 6.571 (30,42%) layanan, sementara untuk media pengaduan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yaitu *WhatsApp* sebanyak 238 (32,29%) layanan dan *email* sebanyak 182 (24,69%) layanan.



Gambar 25. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 11.511 (53,29%) layanan dan kosmetik sebanyak 4.473 (20,71%) layanan. Untuk layanan pengaduan, komoditi yang banyak diadukan yaitu pangan sebanyak 323 (43,83%) layanan dan kosmetika sebanyak 236 (32,02%) layanan.



Gambar 26. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait legalitas sebanyak 17.226 (39,90%) layanan dan proses pendaftaran sebanyak 10.163 (23,54%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi tentang pengajuan perizinan pada *subsiste* e-sertifikasi, informasi umum seperti magang/penelitian,

informasi nomor kontak dan alamat unit di Badan POM, produk terdaftar/legalitas produk, pengujian laboratorium, konsultasi desain kemasan produk, Informasi Nilai Gizi, dan tanggal kedaluwarsa. Untuk layanan pengaduan, topik yang banyak diadukan yaitu tentang legalitas produk sebanyak 611 (41,45%) layanan dan inspeksi seperti pengaduan terhadap produk dan sarana Obat dan Makanan ilegal ataupun tidak sesuai ketentuan sebanyak 304 (20,62%) layanan.



BAB 7

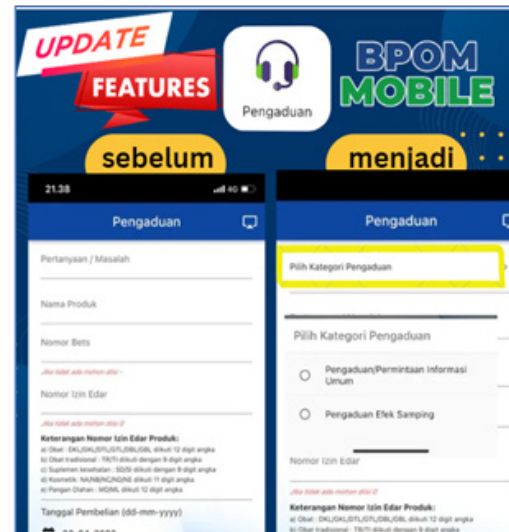
Digitalisasi Pelayanan Publik

1. 2D Barcode

Kebijakan implementasi 2D Barcode sudah berlangsung selama 6 tahun sejak ditetapkan pada tahun 2018. Dalam rangka percepatan implementasi 2D Barcode, Badan POM melakukan pendampingan kepada pelaku usaha serta sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa strategi percepatan implementasi yang telah dilakukan oleh Badan POM sampai dengan triwulan II tahun 2024 antara lain *desk* konsultasi kepada pelaku usaha, menyediakan layanan *helpdesk* teknis dan substansi melalui *e-mail*, serta melakukan sosialisasi 2D Barcode kepada masyarakat.

2. BPOM Mobile

BPOM Mobile merupakan bentuk inovasi dalam strategi komunikasi Badan POM yang akan bermanfaat dalam menunjang peran dan fungsi Badan POM, masyarakat dan *stakeholder* dalam kebersamaan membangun kehidupan bangsa. BPOM Mobile juga merupakan salah satu bentuk dukungan implementasi digitalisasi atau *e-government* yang bermanfaat dalam peningkatan aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Badan POM. Pada triwulan II tahun 2024, BPOM Mobile diperkaya dengan penyempurnaan fitur pengaduan sebagai berikut:



Gambar 27. Fitur BPOM Mobile

Inovasi teknologi dalam pengawasan Obat dan makanan melalui pembangunan aplikasi BPOM *Mobile* dimulai sejak 2018. Aktivitas BPOM *Mobile* dari 2018 sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 28. Aktivitas BPOM *Mobile* Tahun 2018 s.d Triwulan II Tahun 2024

Aktivitas BPOM *Mobile* selama triwulan II tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan tiap bulannya pada aktivitas pindai dan jumlah unduh aplikasi BPOM *Mobile*. Jumlah unduh aplikasi BPOM *Mobile* pada bulan Juni sebanyak 249.779 *user*, pada bulan Mei sebanyak 236.383 *user*, dan sebanyak 234.424 *user* pada bulan April. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan sosialisasi yang banyak digelar pada lingkup internal maupun eksternal. Detail aktivitas BPOM *Mobile* pada triwulan II sebagai berikut:



Gambar 29. Aktivitas BPOM *Mobile* Triwulan II Tahun 2024

3. Aplikasi *Gateway Online Single Submission* dan Penilaian Perizinan Berusaha

Sistem *Gateway Online Single Submission* (OSS) dan Pajak merupakan penunjang integrasi data antara Badan POM dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dengan terintegrasinya aplikasi layanan publik Badan POM dengan OSS RBA, maka BKPM bersama Badan POM secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi integrasi tersebut. Sebagai dasar penarikan produk beredar yang telah mendapatkan perizinan melalui OSS RBA, Badan POM melakukan pertemuan bersama BKPM untuk mengetahui konsep pengawasan sesuai PP No. 5 Tahun 2021 yang diimplementasikan pada OSS RBA.

Pada triwulan II tahun 2024, Badan POM mengadakan kegiatan pembahasan dengan Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka monitoring dan evaluasi integrasi dengan mengangkat isu-isu untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Badan POM berkomitmen untuk terus berkoordinasi aktif serta berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya demi meningkatkan kemudahan berusaha dan kemudahan dalam mengakses informasi layanan Badan POM, khususnya yang berkaitan dengan perizinan berusaha.

Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat maupun *stakeholder* dalam penerapan OSS RBA di Badan POM adalah adanya penyederhanaan persyaratan, prosedur, dan SLA (*Service Level Agreement*) dalam rangka penerbitan PB-UMKU sektor obat dan makanan. Hal ini berdampak pada percepatan perizinan berusaha serta mendukung dalam peningkatan iklim investasi di sektor Obat dan Makanan khususnya bagi pelaku usaha UMKM.

4. Pengembangan Data dan Informasi pada Badan POM *Command Center*

Badan POM *Command Center* (BCC) merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh institusi dalam menjalankan *Crisis Management* atau *Business Continuity Management*. BCC memiliki fungsi untuk mendukung tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan dan pemulihan, serta langkah penyediaan informasi publik.

Adapun kegiatan Pengembangan Data dan Informasi pada BCC yang sudah direalisasikan pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. *Sharing Knowledge* Pemanfaatan Data GeoSpasial
- b. Audiensi Pengelolaan Data Geospasial

Saat ini Badan POM sudah memiliki WebGIS sebagai sistem informasi geospasial Badan POM yang dapat dimanfaatkan untuk pengawasan obat dan makanan. Status geoportal Badan POM sudah terkoneksi namun tetap perlu penyesuaian untuk beberapa hal.

c. Monitoring Pemanfaatan WebGIS Badan POM

Badan POM telah memiliki Data Geospasial yang ditampilkan dalam WebGIS Badan POM yang dapat diakses melalui <https://gis.pom.go.id/>. Ketersediaan data geospasial yang ditampilkan pada Aplikasi Webgis Badan POM telah di monitoring dan evaluasi terlebih dahulu. Webgis Badan POM menampilkan data-data baik internal maupun eksternal, data tersebut dikategorikan menjadi data publik dan terbatas. Untuk melihat data terbatas pengunjung diwajibkan masuk menggunakan akun yang telah didaftarkan.

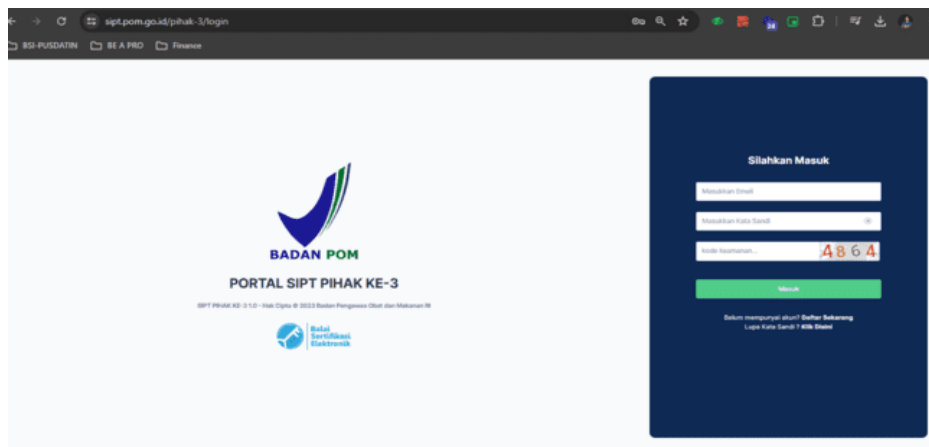
d. Rapat Pembahasan Profil UPT

e. *Reviu Dashboard BCC*

5. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) sebagai sarana pencatatan dan pelaporan hasil pengawasan Obat dan Makanan terus disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan pengawasan terbaru. Pada triwulan I tahun 2024, telah dilakukan implementasi Portal Layanan Pihak Ketiga untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pengujian sampel di seluruh laboratorium milik UPT Badan POM.

Untuk memudahkan proses evaluasi kinerja UPT dalam mengawal pengawasan Obat dan Makanan, SIPT telah terintegrasi dengan SIMETRIS RHPK. Pengembangan di dalam aplikasi SIPT juga terus dilakukan antara lain dengan pengembangan *Dashboard* SIPT, pengembangan Modul Pelaporan Intensifikasi Pengawasan Pangan, dan penyempurnaan *Tools* Monev Regionalisasi Laboratorium.



Gambar 30. Tampilan Login Portal SIPT

6. SMARTPOM

Peningkatan kualitas pengawasan di daerah serta peningkatan peran Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyediakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan atau yang biasa disebut DAK Nonfisik POM. Pengalokasian DAK Nonfisik POM yang ditujukan kepada Pemda bertujuan untuk membantu meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Untuk mempermudah tahapan perencanaan dan monitoring serta evaluasi kegiatan yang menggunakan alokasi anggaran DAK Nonfisik POM, Badan POM mengembangkan aplikasi SMARTPOM. Pada triwulan II tahun 2024, sudah dilakukan pengembangan penyesuaian menu DAK Nonfisik Tahun 2024 aplikasi SMARTPOM, dimana terdapat beberapa perubahan pelaporan DAK Nonfisik pada tahun 2024 sehingga dilakukan penyesuaian data pada Menu SMARTPOM yaitu pada modul Pelaporan Pengkajian Izin Fasilitas Pelayanan Kefarmasian; Pelaporan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; Pelaporan *Post Market* IRTP; dan Pelaporan Realisasi Keuangan.



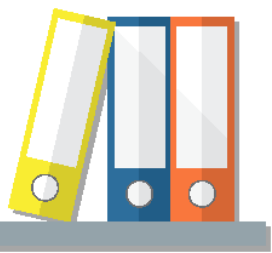
Gambar 31. Tampilan Menu *Login* pada Aplikasi SMART POM

7. Layanan *Helpdesk* Pusdatin

Aplikasi *Help* Pusdatin (ITSM) merupakan aplikasi pengelolaan katalog layanan Pusdatin yang menjadi media komunikasi antara pegawai Badan POM di seluruh Indonesia sebagai pengguna layanan dengan Pusdatin sebagai pengelola layanan. Dalam aplikasi ini terdapat 2 macam layanan yang disediakan yaitu permohonan dan pengaduan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi aplikasi *Help* Pusdatin pada periode triwulan II tahun 2024, total pengajuan permohonan dan pengaduan adalah sebanyak 1.768 layanan yang terdiri dari 629 permohonan dan 1.139 pengaduan. Rata-rata waktu tindak lanjut yaitu 2 – 3 hari untuk permohonan dan 3 – 4 hari untuk pengaduan.

629 Jumlah Permohonan	60 Permohonan Tiket Terbit	21 Permohonan Dalam Proses	505 Permohonan Selesai	43 Permohonan Ditolak
1139 Jumlah Pengaduan	61 Pengaduan Tiket Terbit	128 Pengaduan Dalam Proses	940 Pengaduan Selesai	1 Pengaduan Ditolak

Gambar 32. *Dashboard* Data Pengajuan pada Layanan *Helpdesk* Pusdatin



BAB 8

Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

1. Penyusunan Regulasi

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, telah ditetapkan 12 Peraturan Badan POM, 33 Keputusan/Surat Edaran Kepala Badan POM, dan 47 Rumusan Perjanjian.

Judul Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisis Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

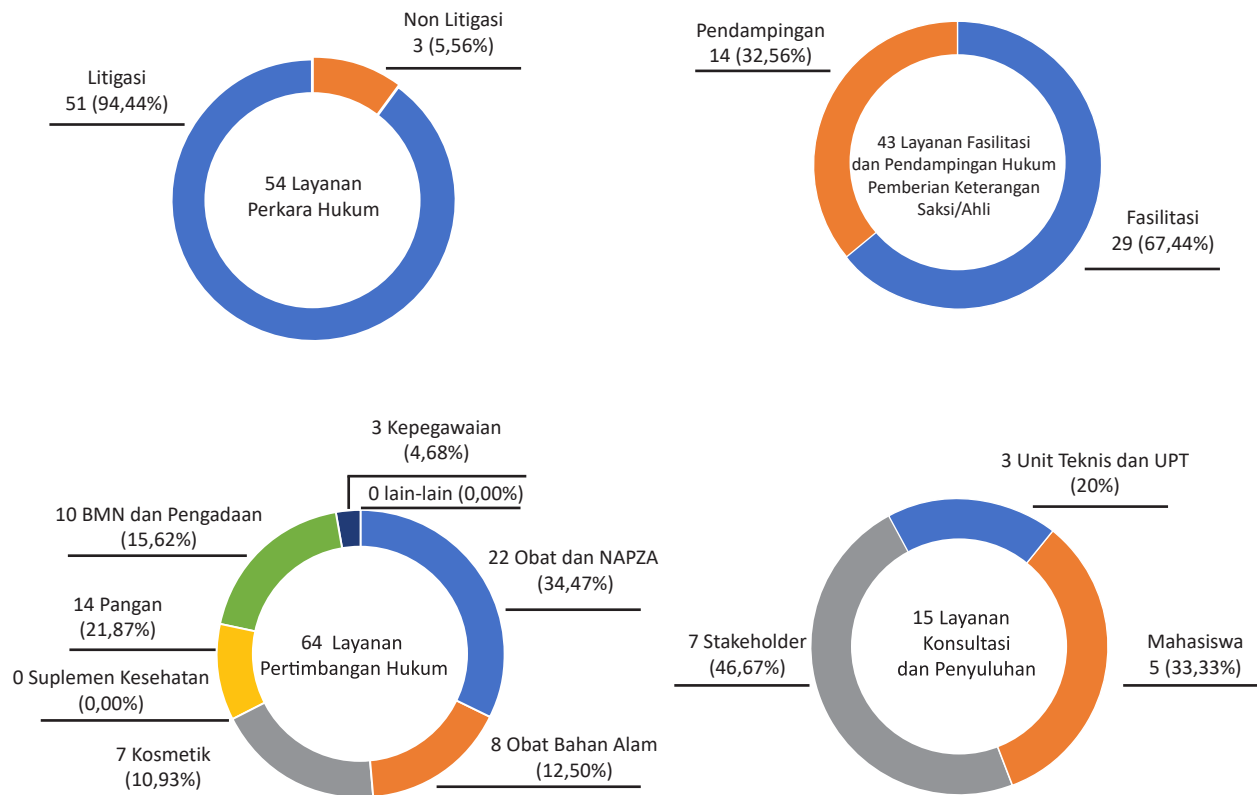


7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Dan Suplemen Kesehatan
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2024
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat Melalui Mekanisme Jalur Khusus (*Special Access Scheme*)

2. Layanan Advokasi Hukum

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh Badan POM sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 33.



Gambar 33. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan II Tahun 2024



BAB 9

Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Badan POM melakukan penataan organisasi untuk terciptanya organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan nasional. Penataan organisasi merupakan proses evaluasi terhadap struktur organisasi Badan POM *existing* baik pada organisasi induk maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi unit kerja Pusat, telah dilakukan pembahasan Evaluasi Kelembagaan Badan POM tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Pertemuan ini dihadiri Tim Evaluasi Kelembagaan Badan POM pada tanggal 26 April 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Badan POM tahun 2024 diperoleh nilai rata-tata sebesar 84,87 dan dapat disimpulkan bahwa organisasi Badan POM tergolong sangat efektif jika dinilai dari sisi struktur dan proses. Hasil evaluasi kelembagaan Badan POM telah disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Surat Sekretaris Utama Nomor OT.01.02.2.06.24.469 tanggal 21 Juni 2024 perihal Hasil Evaluasi Kelembagaan Badan POM tahun 2024.



Selain itu, Badan POM telah melakukan penataan kepada UPT dilingkungan Badan POM melalui:

- a. Evaluasi klasifikasi UPT Badan POM tahun 2024 telah terhadap 76 UPT menggunakan instrumen pada Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi UPT pada Badan POM. Seluruh data yang digunakan pada evaluasi klasifikasi UPT Badan POM tahun 2024 bersumber dari Laporan Tahunan UPT Badan POM tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi UPT Badan POM didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan 17 Loka POM menjadi Balai POM
 - 2) Peningkatan 2 Balai POM menjadi Balai Besar POM
- b. Pengubahan Lokasi UPT
- c. Penyempurnaan Nomenklatur UPT

2. Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sehubungan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024 telah dilakukan pertemuan penyusunan Rencana Aksi RB General Badan POM tanggal 12 Juni 2024 dan Rencana Aksi RB Tematik Badan POM tanggal 13 Juni 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun Rencana Aksi RB Tematik Badan POM tahun 2024 sebagai penjabaran dari perubahan *Road Map* RB Badan POM Tahun 2023 – 2024 dan menindaklanjuti Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi RB Tahun 2024. Badan POM telah menyampaikan Rencana Aksi Pelaksanaan RB Badan POM tahun 2024 kepada Kementerian PANRB melalui www.portalrb.id.

3. Tata Laksana

a. Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Badan POM

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan tim penilaian mandiri SPIP Terintegrasi untuk melakukan penilaian sesuai dengan tata cara yang berlaku. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Bimtek melibatkan tim penilai dari seluruh satuan kerja yang dilaksanakan dalam pertemuan pada tanggal 3 April 2024 di Depok dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hasil dari pelaksanaan Bimtek ini yaitu terdapat peningkatan pemahaman peserta yang diperoleh dari data evaluasi kegiatan, dimana terdapat peningkatan pada rata-rata nilai *post-test* yaitu menjadi 80 dari 55 pada

rata-rata nilai *pre-test* sehingga dapat menerbitkan sertifikat Bimtek pada 144 peserta atau 70,24% dari keseluruhan peserta.

b. **Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Badan POM**

Pelaksanaan *workshop* penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi merupakan kegiatan inti dari seluruh rangkaian kegiatan penilaian. Pelaksanaan *workshop* bertujuan untuk Tim Penilai dapat memberikan penilaian melalui pengisian kertas kerja penilaian dan penyampaian data dukung penilaian. Kegiatan *workshop* dilaksanakan secara kombinasi luring dan daring selama dua hari pertemuan pada tanggal 22 – 23 April 2024 yang melibatkan seluruh Tim Penilai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.05.24.98 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan POM.

c. **Bimbingan Teknis *Awareness* Sistem Manajemen Terintegrasi Badan POM**

Pelaksanaan bimbingan teknis *Awareness* Sistem Manajemen Terintegrasi Badan POM merupakan rangkaian kegiatan dari pembangunan Sistem Manajemen Terintegrasi yang dimulai dengan penyusunan dan sosialisasi Manual Sistem Manajemen Terintegrasi serta bimbingan teknis *awareness* Sistem Manajemen Terintegrasi. Pelaksanaan bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik (*awareness*) bagi seluruh pegawai terkait apa yang dimaksud dengan Sistem Manajemen Terintegrasi, tujuan dan manfaat serta bentuk pelaksanaannya (implementasi).

Kegiatan bimbingan teknis *awareness* dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka selama dua hari yang dibagi dalam 4 (empat) tahap pelaksanaan dengan pembagian wilayah kerja, sebagai berikut:

- 1) Tahap I bagi Unit Kerja Pusat (kecuali PPPOMN dan Direktorat Siber), berfokus pada implementasi integrasi SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016 yang dilaksanakan di Jakarta pada 29-30 April 2024.
- 2) Tahap II bagi UPT di wilayah tengah (Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, dan sebagian Jawa), PPPOMN dan Direktorat Siber, berfokus pada implementasi integrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO 37001:2016 yang diselenggarakan di Aula Balai Besar POM di Denpasar pada 2-3 Mei 2024.
- 3) Tahap III bagi UPT di wilayah barat (Sumatera dan Jawa), berfokus pada implementasi integrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO 37001:2016 yang diselenggarakan bertempat di Aula Balai Besar POM di Medan pada 6-7 Mei 2024.
- 4) Tahap IV bagi UPT di wilayah timur (Sulawesi, Maluku, dan Papua), berfokus pada implementasi integrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO 37001:2016 yang diselenggarakan bertempat di Aula Balai Besar POM di Makassar pada 13-14 Mei 2024.

Bimbingan teknis *awareness* yang melibatkan perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.05.24.105 Tahun 2024 tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Badan POM.

d. Sosialisasi Hasil Tinjau Ulang Manual Sistem Manajemen Terintegrasi Badan POM

Badan POM telah melakukan tinjau ulang proses bisnis dan SOP Makro, yang dimulai dari Minggu ke- I Januari sampai Minggu ke- IV April 2024. Kegiatan ini mengacu pada pedoman Peraturan Menteri PAN RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis di Instansi Pemerintah. Hasil tinjau ulang proses bisnis, subproses bisnis, lintas fungsi, dan SOP Makro adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Tinjau Ulang Manual Sistem Manajemen Terintegrasi Badan POM

URAIAN	SEMULA	MENJADI
Peta Proses Bisnis	16	16
Peta Subproses Bisnis	37	39
Peta Lintas Fungsi	54	55
SOP Makro	94	93

Sebagai tindak lanjut hasil tinjau ulang, Badan POM melakukan sosialisasi hasil tinjau ulang Proses Bisnis dan SOP Makro untuk memberikan pemahaman yang baik (*awareness*) bagi seluruh pegawai terkait perubahan berupa penambahan, penyederhanaan, atau penggabungan pada bisnis proses, sub bisnis proses atau SOP Makro.

Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting* pada tanggal 5 Juni 2024 dengan melibatkan para Pimpinan Tinggi Madya dan para Pimpinan Tinggi Pratama baik Unit Pusat maupun Kepala Balai Besar selaku Ketua Tim Penjamin Mutu beserta Tim Manajemen Representatif yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.05.24.98 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan POM.

e. **Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Manajemen Puncak Badan POM**

Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi Manajemen Puncak Badan POM merupakan salah satu persyaratan wajib dalam penerapan sistem manajemen terintegrasi sebagai bagian dari evaluasi kinerja sistem manajemen terintegrasi. Audit internal wajib dilaksanakan secara periodik untuk menjaga komitmen dalam pelaksanaan sistem manajemen terintegrasi dan meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen terintegrasi.

Kegiatan audit internal dilaksanakan secara *on site* selama dua hari pada 11-12 Juni 2024 yang melibatkan seluruh manajemen representatif Manajemen Puncak, perwakilan manajemen representatif masing-masing Satuan Kerja Eselon I dan perwakilan manajemen representatif dari setiap unit kerja pusat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.05.24.98 tentang Tim Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Badan POM.



BAB 10

Kerjasama Internasional

1. Badan POM Kawal Penguatan Pengawasan Obat Melalui Implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) bersama PMDA

Plt. Kepala Badan POM berkunjung ke Jepang pada tanggal 22 April 2024. Kunjungan kerja ini bertujuan menghadiri dan mengikuti serangkaian pertemuan yang diadakan oleh *Pharmaceutical and Medical Devices Agency* (PMDA) sebagai bentuk peningkatan implementasi kerja sama antar kedua regulator pada bidang pengawasan obat.



Pertemuan berfokus pada pembahasan terkait peningkatan kolaborasi dalam joint assessment dan penguatan kapasitas regulasi pengawasan obat, khususnya terkait dengan mekanisme *reliance* antara negara anggota ASEAN dengan dukungan dari *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency* (PMDA) Jepang dan WHO. Mekanisme *reliance* ini akan memungkinkan penggunaan hasil evaluasi dari regulator negara referensi dalam mendukung proses pengambilan keputusan guna mempercepat ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat.



Selain itu, dilakukan pertemuan yang membahas kerja sama yang telah diformalisasi melalui *Memorandum of Cooperation* yang ditandatangani pada 27 Agustus 2021. Kerja sama tersebut meliputi pelatihan, berbagi informasi, dan penilaian obat baru melalui mekanisme *reliance*. Beberapa usulan kerja sama yang dibahas telah dimasukkan dalam *Action Plan 2024* seperti *long-term trainees* pegawai Badan POM di PMDA juga pelatihan yang diselenggarakan melalui PMDA-ATC dengan durasi pendek

2. Kunjungan Kerja Plt. Kepala Badan POM dan Delegasi ke Korea Selatan

Plt. Kepala Badan POM melakukan Kunjungan Kerja ke Korea Selatan pada tanggal 12 – 14 Mei 2024. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk menghadiri pertemuan *2nd Asian-Pacific Food Regulatory Authority Summit* (APFRAS), melaksanakan pertemuan bilateral dengan *Ministry of Food and Drug Safety* (MFDS) dan melaksanakan kunjungan ke *Daewoong Pharmaceutical* yang fokus bergerak pada bidang manufaktur produk farmasi.

a. Menghadiri pertemuan *2nd Asian-Pacific Food Regulatory Authority Summit* (APFRAS)

Pertemuan ini berfokus pada isu-isu seperti standar keamanan pangan, *product labelling*, perlindungan konsumen, dan harmonisasi regulasi terkait pangan. Keanggotaan Badan POM pada APFRAS bermanfaat, khususnya dalam mendalami isu-isu terbaru mengenai regulatori pangan termasuk menyampaikan posisi Badan POM agar nantinya dapat sejalan dengan aturan maupun kesepakatan internasional.

Dalam pertemuan tersebut, Plt. Kepala Badan POM mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan *statement* pada agenda *panel discussion*, bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab semua negara, dan Badan POM sebagai instansi yang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan nilai gizi pangan olahan berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi konsumen, mendorong praktik perdagangan yang adil, serta mendukung metode produksi pangan berkelanjutan,



b. Guna dukung kemudahan perizinan masuk produk makanan, pertemuan bilateral Badan POM dan MFDS terlaksana

Pertemuan membahas mengenai pencabutan pemberlakuan kewajiban pengujian *Ethylene Oxide* untuk produk mi instan asal korea, akses percepatan pemasukan produk susu asal korea dan MRA saling pengakuan hasil inspeksi sarana produksi pangan antar kedua negara. Badan POM akan menindaklanjuti beberapa hal, diantaranya: akan melakukan koordinasi dan diskusi teknis lebih lanjut dengan MFDS terkait *review* persyaratan *Ethylene Oxide* pada produk mi instan asal Korea; akan mempelajari langkah – langkah yang telah dilakukan oleh EU terkait dengan pencabutan persyaratan sertifikat *Ethylene Oxide* pada mie instan Korea; dan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait penjadwalan inspeksi dalam rangka tahapan pemasukan produk susu Korea ke Indonesia.



c. Kunjungan ke *Daewoong Pharmaceutical Co, Ltd*



Plt. Kepala Badan POM dan Delegasi mengunjungi *R&D Daewoong Pharmaceutical*, perusahaan farmasi terdepan di Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1945. Kunjungan Badan POM ke *Daewoong Pharmaceutical* merupakan langkah strategis untuk mendapatkan wawasan mengenai kemajuan dan inovasi yang dirintis *Daewoong* di bidang farmasi, termasuk upaya penelitian terkini, metodologi, dan rangkaian pengembangan produk yang dimiliki Daewoong, serta rencana Daewoong mengembangkan bisnis mereka di Indonesia termasuk peningkatan kapasitas dan transfer teknologi di Indonesia.

3. Badan POM Memberikan Pelatihan Pengawasan Obat dan Makanan untuk Mendukung Perjuangan Palestina

Badan POM telah menyelenggarakan program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) untuk Palestina tahun 2024 di Amman, Yordania pada tanggal 20-23 Mei 2024. Program pelatihan ini diberikan kepada pejabat Kementerian Kesehatan Palestina dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan peserta dalam bidang pengawasan obat dan keamanan pangan dalam rangka pembentukan otoritas regulator obat dan makanan Palestina yang mandiri.



Pelatihan di Amman, Yordania dipilih dengan mempertimbangkan situasi keamanan Palestina. Sebanyak 15 peserta menempuh perjalanan darat dari kota Ramallah di Palestina melintasi perbatasan *Allenby Bridge* dan *King Hussein Bridge Border*. Peningkatan kapasitas bagi regulator Palestina ini sangat penting untuk memastikan pasokan obat dan makanan yang masuk ke Palestina tetap aman dan berkualitas.

Pelatihan dibuka oleh Plt. Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalucia yang menegaskan kembali janji Indonesia yang berkelanjutan dan teguh untuk mendukung perjuangan Palestina, khususnya di masa-masa sulit ini. Pelatihan juga dihadiri oleh Duta Besar Indonesia untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmo Sarwono yang menyampaikan rasa terima kasihnya atas upaya nyata Badan POM membantu Palestina dan kesungguhan Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina hingga terpenuhinya hak-hak rakyat Palestina dan terwujudnya kemerdekaan Palestina. Indonesia juga teguh memberikan dukungan politik terhadap Palestina di forum dunia. Program kerja sama ini terus bergulir intensif dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan. Pemerintah Palestina sangat menghargai peningkatan kapasitas yang diberikan oleh Indonesia melalui Badan POM selama ini menunjukkan simbol persaudaraan dan dukungan penuh Indonesia untuk perjuangan pemerintah dan rakyat Palestina.



Direktur Registrasi Obat, Kementerian Kesehatan Palestina, Mustofa Alnadi mengungkapkan rasa terimakasih atas dukungan Indonesia dalam pengawasan obat dan makanan yang independen bagi Palestina. Di sela-sela pelatihan dia menceritakan kondisi sulit Palestina saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar di Palestina.

Peserta kegiatan terbagi dalam dua kelas yakni pengawasan obat dan keamanan pangan. Para peserta terlihat antusias berdiskusi terkait *best practice* yang dilakukan Badan POM. Kasus demi kasus ditanyakan untuk mencari solusi setiap permasalahan pengawasan obat dan makanan. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pengawas obat dan makanan di Palestina, sekaligus mendorong pembentukan otoritas obat dan makanan Palestina yang independen.

4. Kunjungan Kerja Plt. Kepala Badan POM dan Delegasi ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

Plt. Kepala Badan POM beserta delegasi melakukan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tanggal 26-29 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dan meningkatkan kualitas obat dan vaksin di Indonesia. Melalui kegiatan kunjungan kerja ke RRT ini diharapkan dapat menunjukkan komitmen Badan POM untuk meningkatkan kualitas dan akses obat kanker dan vaksin mRNA berkualitas dan terjangkau di Indonesia melalui kolaborasi dengan mitra internasional dalam pengembangan obat dan mendorong pengembangan industri farmasi di Indonesia.

a. Kunjungan ke Tsinghua University

Kunjungan ini merupakan salah satu bagian dari upaya meningkatkan komitmen kolaborasi dengan Pusat Pengembangan dan Penelitian Vaksin dan Genomik Indonesia RRT (*Indonesia-China Joint Development and Research Center on Vaccine and Genomics*). Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara *Indonesia-China Joint Development and Research Center on Vaccine and Genomics* (Tsinghua University) dan PT Increase Laboratorium Indonesia di bidang riset kolaboratif. Melalui kunjungan ini diharapkan ke depannya Badan POM dapat menjajaki peluang dalam peningkatan kapasitas SDM Badan POM melalui pendidikan formal (S2 dan S3) dan *short course* di Tsinghua University.

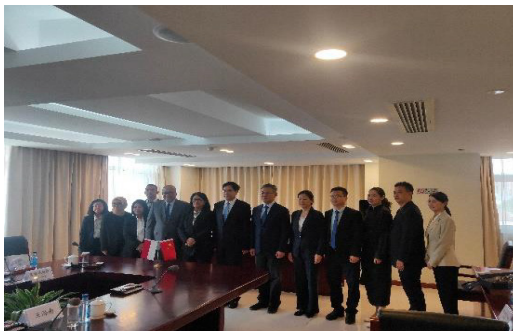


b. Kunjungan CanSino Biologics Inc.

Plt. Kepala Badan POM mengunjungi CanSino Biologics Inc., perusahaan bioteknologi terkemuka di RRT. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama strategis dalam bidang pengembangan obat dan vaksin, khususnya terkait transfer teknologi dan peningkatan akses terhadap produk-produk berkualitas tinggi di Indonesia. Kunjungan ke CanSino Biologics Inc. merupakan langkah penting dalam upaya Badan POM untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap obat dan vaksin di Indonesia. Dengan kerja sama yang strategis, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan keahlian CanSino Biologics Inc untuk mengembangkan produk-produk inovatif yang terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

**c. Kunjungan ke National Medical Products Agency (NMPA)**

Plt. Kepala Badan POM bertemu dengan Deputy XU Jinghe, *Deputy Commissioner* dari NMPA dan pertemuan ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali komitmen kedua pihak dalam memperkuat kerjasama yang telah dimulai sejak penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* Badan POM dengan NMPA pada tahun 2021. MoU tersebut berfokus pada harmonisasi regulasi obat dan kosmetik.



Pada pertemuan tersebut, Plt. Kepala Badan POM mengusulkan beberapa kegiatan kerja sama konkrit untuk memperkuat regulasi dan pengawasan obat, seperti *on-the-job training*, *internship*, *joint assessment*, pengiriman staf Badan POM ke NMPA untuk mempelajari pembuatan baku pembanding untuk pengujian obat dan bekerja sama untuk mengatasi peredaran obat palsu dan ilegal melalui penjualan obat secara daring. Selain itu, kedua pihak sepakat untuk menyusun *action plan* yang berisi rincian kegiatan kerja sama dan menetapkan *focal point* untuk implementasi kerjasama. Pertemuan Badan POM dan NMPA merupakan langkah maju yang signifikan dalam memperkuat regulasi dan pengawasan obat. Dengan menjalin kolaborasi, Badan POM dan NMPA dapat bersama-sama memastikan ketersediaan obat-obatan yang aman, efektif, dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia dan RRT.

d. Kunjungan ke BeiGene



Plt. Kepala Badan POM dan delegasi melakukan kunjungan ke BeiGene yang bertujuan untuk meninjau fasilitas produksi dan membahas *roadmap* kolaborasi dalam pengembangan obat kanker. Fasilitas BeiGene yang modern dan canggih memungkinkan produksi obat-obatan berkualitas tinggi, seperti Tislelizumab dan Brukinsa. Obat-obatan ini terbukti efektif dalam pengobatan berbagai jenis kanker, seperti kanker paru-paru, karsinoma urotelial, dan limfoma. Kolaborasi antara Badan POM dan BeiGene dengan Etana Biotechnologies membuka peluang baru untuk transfer teknologi PD-1. Transfer teknologi ini akan memung-

kinkan Etana untuk memproduksi obat kanker PD-1 secara lokal di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses pasien terhadap obat kanker yang berkualitas dan terjangkau.

e. Kunjungan ke Shanghai Henlius Biopharmaceutical Co. Ltd/ Fosun Pharma

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau fasilitas manufaktur dan membahas peluang kerja sama dalam pengembangan obat kanker. Henlius memiliki fasilitas manufaktur modern yang memproduksi obat-obatan berkualitas tinggi seperti Zerpidio dan Hertumab. Obat-obatan ini terbukti efektif dalam pengobatan kanker paru-paru dan kanker payudara. Kerja sama dengan Henlius diharapkan dapat mempercepat akses pasien di Indonesia terhadap obat kanker yang inovatif dan terjangkau.



f. Kunjungan ke RNA Cure

Plt. Kepala Badan POM dan delegasi mengunjungi RNA Cure, perusahaan yang berfokus pada pengembangan vaksin mRNA untuk hewan dan manusia. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas profil dan kemungkinan kerja sama dalam pengembangan vaksin. RNA Cure memiliki pengalaman kerja sama dengan berbagai institusi ternama, seperti Fudan University, Qvac, BioNTech, Rovax, dan Etana Indonesia. Kemampuan mereka untuk menyelesaikan pembuatan vaksin dalam 62 hari dengan mengubah antigen menjadikannya mitra potensial dalam pengembangan vaksin di Indonesia. Plt. Kepala Badan POM menyambut baik kolaborasi internasional yang dilakukan RNA Cure dan mendorong mereka untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Indonesia. Plt Kepala Badan POM mengharapkan Prof. Lin dapat berkunjung ke Indonesia untuk dapat memberikan sharing pengalaman terkait penelitian vaksin mRNA.





BAB 11

Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, total pegawai di Badan POM sebanyak 5.375 pegawai yang terdiri dari 4.862 orang PNS, 512 PPPK, dan 1 POLRI/Jaksa. Demografi pegawai di Badan POM berdasarkan gender terdiri dari 1.520 orang (28,29%) laki-laki dan 3.853 orang (71,71%) perempuan. Sedangkan berdasarkan tipe kepegawaian, pegawai Badan POM terdiri dari 4.734 orang (88,01%) Fungsional, 482 orang (8,96%) Pelaksana, dan 163 orang (3,03%) Struktural.

2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung program sertifikasi dan uji kompetensi, pengembangan kompetensi, pengelolaan pengetahuan organisasi, serta pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), selama triwulan II tahun 2024 Badan POM mengelola 7 aplikasi dengan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi sebagai berikut:

a. LSP BPOM

LSP BPOM selaku unit pelaksana sertifikasi melakukan sertifikasi kompetensi di bidang keamanan pangan bagi Penyuluh Keamanan Pangan Pertama (PKP Pertama) dan Inspektur Muda Keamanan Pangan (*District Food Inspector Junior*) di Lingkungan Pemerintah Daerah dan internal Badan POM dengan pelaksanaan menggunakan aplikasi LSP BPOM (link: <https://lspbpom.pom.go.id>). Hasil pemanfaatan aplikasi LSP BPOM sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 5. Hasil Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi LSP BPOM s.d. Triwulan II Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Kompeten		Belum Kompeten	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama	278	277	99%	1	1%
2.	Sertifikasi Kompetensi DFI Junior	305	300	98%	5	2%
Total		583	577	99%	6	1%

b. PENKOMTEK

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kompetensi, pemberian umpan balik dan monitoring penggunaan aplikasi penilaian kompetensi teknis (PENKOMTEK) (<https://penkomtek.pom.go.id/>) sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 6. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi PENKOMTEK s.d. Triwulan II Tahun 2024

No.	Keterangan	Periode	Jumlah Peserta yang diterima	Jumlah Peserta yang ditolak
1.	Pemetaan Kompetensi	Februari	110	0
2.	Uji Kompetensi	Februari	119	18
3.	Pemetaan Kompetensi	Maret	25	0
4.	Pemetaan Kompetensi	Mei	40	0
5.	Uji Kompetensi	Mei	159	7
6.	Pemetaan Kompetensi	Juni	57	0
Total			510	25

c. SIPENATEMANKU

Penilaian kompetensi yang selama ini dilakukan yaitu Uji Kompetensi dan Pemetaan kompetensi secara *online* dengan menggunakan Aplikasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, serta Psikotes Online (SIPENATEMANKU) (link <https://asesmen.pom.go.id>). Hasil penilaian kompetensi sampai dengan triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 7. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi SIPENATEMANKU s.d. Triwulan II Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Peserta		Waktu Pelaksanaan
		SJT	AC	
1	Ukom Pengangkatan Kembali	-	1	10 Januari 2024
2	Ukom Pengangkatan Kembali	-	1	5 Februari 2024
3	Pemetaan BBPOM di Medan, Loka POM di Kab. Toba, dan Loka POM di Kota Tanjung Balai	64	-	29 Januari 2024
		-	13	12 Februari 2024
4	Pemetaan BPOM di Jambi dan Loka POM di Kab. Bungo	53	-	29 Januari 2024
-			3	19 Maret 2024

No	Uraian	Jumlah Peserta		Waktu Pelaksanaan
		SJT	AC	
5	Pemetaan BPOM di Pangkal Pinang dan Loka POM di Kab. Belitung	38	-	29 Januari 2024
		-	2	19 Maret 2024
6	Pemetaan Pusat Batch 1	55	-	27 Maret 2024
7	Ukom Batch 1	56	-	23 Februari 2024
		-	20	22-29 Februari 2024
8	Pemetaan BPOM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang	27	-	28 Mei 2024
		-	1	13-27 Juni 2024
9	Pemetaan BBPOM di Pekanbaru, Loka POM di Kota Dumai, dan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	55	-	28 Mei 2024
		-	8	13-27 Juni 2024
10	Pemetaan BPOM di Mamuju	20	-	28 Mei 2024
		-	1	13-27 Juni 2024
11	Ukom April (Pemenuhan data talenta)	2	-	29 April 2024
12	Ukom Batch 2	52	-	3 Juni 2024
		-	49	3-7 Juni 2024

d. ERUDITIO

Badan POM juga menerbitkan jurnal terkait pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia melalui aplikasi ERUDITIO (<https://eruditio.pom.go.id/index.php/home>). Jurnal dan artikel yang sudah diterbitkan pada periode tahun 2020-2024 berjumlah 7 jurnal dan 45 artikel. Progres yang sedang dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2024 yaitu sedang dilakukan proses *Call For Paper*.

e. CMC

Sampai dengan triwulan II tahun 2024, sudah terlaksana 3 kegiatan *coaching* dan 9 kegiatan *mentoring* melalui aplikasi CMC Badan POM (<https://ppsdms.pom.go.id/panel/cmc>).

f. SIMPHONI

Badan POM memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management*. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau unit kerja di Badan POM untuk *sharing* data, informasi, dan pengetahuan ke

pegawai atau unit kerja lain. Sampai dengan triwulan II tahun 2024, sudah terdapat publikasi sebanyak 4.930 pengetahuan dan 39 proses revisi pada aplikasi SIMPHONI (<https://ppsdm.pom.go.id/simponi>).

g. IDEAS

Aplikasi *Integrated Development and Training Information System* (IDEAS) merupakan *platform* pengembangan kompetensi digital terintegrasi di Badan POM. Aplikasi tersebut memiliki fitur *online shopping training* atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara *online* kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat *online* di mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>. Data pemanfaatan aplikasi IDEAS selama triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.

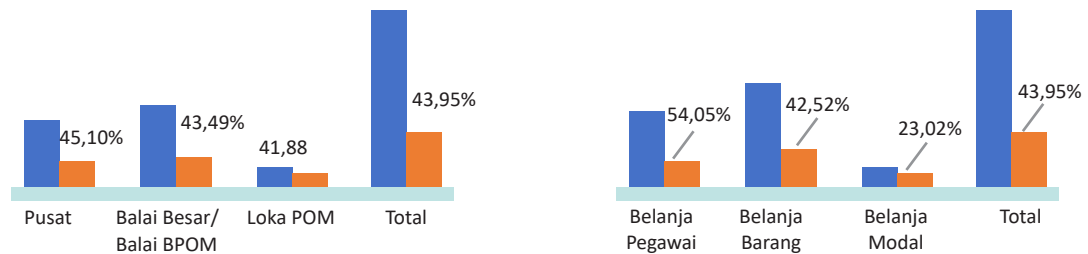
Tabel 8. Hasil Monitoring Pemanfaatan Aplikasi IDEAS s.d. Triwulan II Tahun 2024

No.	Uraian	TW I	TW II	Jumlah
1	Pegawai BPOM yang belajar IDEAS	2.124	1.042	3.166 (65%)
2	ASN Non BPOM yang belajar IDEAS	5	5	10
3	Pelaku usaha yang belajar IDEAS	2	0	2
4	Akun eksternal yang belajar IDEAS	429	307	766
5	Modul terbaru yang diupload	16	11	27
6	Webinar yang dilaksanakan	11	12	23

BAB 12

Realisasi Anggaran Sampai dengan Juni 2024

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.354.321.946.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 42 Balai Besar/Balai POM dan 31 Loka POM. Realisasi anggaran per Juni tahun 2024 sebesar, Rp1.034.778.306.396 (43,95%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp384.336.144.592 realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp 576.508.636.278, dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp 73.933.525.526.



Gambar 34. Realisasi Anggaran s.d Maret 2024

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	852.096.226.000	384.336.144.592	45,10%
Balai Besar/ Balai POM	1.325.704.712.000	576.508.636.278	43,49%
Loka POM	176.521.008.000	73.933.525.526	41,88%
Total	2.354.321.946.000	1.034.778.306.396	43,95%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	804.240.516.000	1.247.639.596.000	302.441.834.000	2.354.321.946.000
Realisasi	434.700.349.936	530.468.196.543	69.609.759.917	1.034.778.306.396
%	54,05%	42,52%	23,02%	43,95%



BAB 13

Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2024. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per bulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Juni tahun 2024 sebagaimana terlampir pada buku ini.



Penutup

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous Improvement*.



LAMPIRAN I

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN BPOM S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
A.	Program Pengawasan Obat dan Makanan					
		Indeks Pengawasan Obat	91	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89	Indeks	-	Akhir Tahun
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	96.7	%	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Makanan	86	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	359	Kab/Kota	-	Akhir Tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51	%	-	Akhir Tahun
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	94.75	%	93.62	98.81%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	86	%	90.70	105.47%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	%	91.76	100.84%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	81.5	%	89.64	109.99%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	%	90.22	100.24%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	86	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	92	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91.29	Indeks	-	Akhir Tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	95	%	97.65	102.79%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	75	%	74.59	99.45%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	97	%	86.64	89.32%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	70	%	69.00	98.57%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	71	%	76.22	107.35%
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.51	Indeks	-	Akhir Tahun
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81	%	55.06	67.98%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	97	Nilai	93.68	96.58%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3400	Sekolah	Progress 49,43%	
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	1105	Desa	Progress 44,95%	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	450	Pasar	Progress 57,24%	
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	41.25	41.25%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	43.19	43.19%
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	81	%	36.08	44.54%
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan laboratorium/GLP	91	%	-	Akhir Tahun
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	90	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	92.1	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	99	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	91	%	100.00	109.89%
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	92.5	%	94.17	101.81%
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	100	%	100.00	100.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	92.9	%	33.33	35.88%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	92	%	75.00	81.52%
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	3	Persen	2.25	75.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89.13	Persen	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89.35	Persen	-	Akhir Tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.74	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase laporan informasi dan laporan intelijen UPT yang sesuai prosedur	80	%	-	Akhir Tahun
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	88	%	84.87	96.44%
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	88	%	80.00	90.91%
		Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	86	%	75.00	87.21%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	92	%	75.00	81.52%
1.4	Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	91.75	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4.9	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92.2	Indeks	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	92.09	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	78.5	%	82.24	104.76%
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tep	88	%	91.05	103.47%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	98.5	%	99.54	101.06%
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	98.5	%	100.00	101.52%
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang disel	92	%	92.04	100.04%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	81	%	84.30	104.07%
		Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	89	%	91.46	102.76%
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	72	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	100	%	100.00	100.00%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan olahan	87.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4.55	Indeks	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	3	Indeks	2.50	83.33%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90.81	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	92	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan sesuai standar	350	Kab/Kota	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	95	%	81.35	85.63%
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	72	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	98.3	%	97.86	99.55%
		Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	87.80	92.42%
		Persentase Koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	90	%	32.20	35.78%
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	95	%	75.00	78.95%
		Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan SJKPMP	25	%	10.20	40.80%
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan masyarakat terhadap Pengawasan produksi yang diberi	94.6	%	95.03	100.45%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	100	%	90.00	90.00%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	87	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.65	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	87.41	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	93.19	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.33	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas sektor	85	%	87.12	102.49%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	70.05	%	71.14	101.56%
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	89	%	91.30	102.58%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	%	97.33	105.79%
		Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/ Balai POM/Loka POM	98	%	98.68	100.69%
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	94	%	94.56	100.60%
		Persentase sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	81	%	81.19	100.23%
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	86	%	16.67	19.38%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100	%	85.00	85.00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik di bidang distribusi obat,	93.5	%	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4.65	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	3	%	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Dit.Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	87.21	%	81.47	93.42%
		Indeks RB Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	93.33	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.94	%	-	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	81	Indeks	-	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	97	%	100.00	103.09%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	95.5	%	98.47	103.11%
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	96	%	95.93	99.93%
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	88	%	84.19	95.67%
		Persentases stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	85	%	36.13	42.51%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Dit.Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	100	%	100.00	100.00%
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label dan iklan	55.2	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan Obat dan NPP	93.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, p	92	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, P	4.7	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, P	91.26	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prek	95.43	%	-	Akhir Tahun
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60800	Label dan Iklan	31405.00	51.65%
		Jumlah permohonan ekspor impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu	18300	Permohonan	12682.00	69.30%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	89.68	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	80.2	%	80.46	100.32%
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	88	%	69.57	79.06%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	78	%	67.31	86.29%
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	93.91	%	99.64	106.10%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, N	98	%	100.00	102.04%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	90	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4.85	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	90.56	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	91.95	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Pengawasan Post Market sesuai Standar	350	Kab/Kota	-	Akhir Tahun
		Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	3000	sarana	2505.00	83.50%
		Jumlah Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan tepat waktu	67000	Permohonan	37099.00	55.37%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.25	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase Instansi Pemerintah yang berperan aktif dalam Pengawasan Makanan	95	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai Standar	96.5	%	99.52	103.13%
		Persentase Pelaku Usaha dan Masyarakat yang Meningkatkan Pengetahuannya Terhadap Implementasi Peraturan	87.7	%	93.94	107.12%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Persentase UPT BPOM yang Melakukan Pengawasan sesuai Standar	84.1	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Baik	95	%	80.00	84.21%
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	91	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik	4.85	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi ONPP yang optimal	3	Indeks	2.50	83.33%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	91.22	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	94.1	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.75	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku yang diawasi	94	%	44.44	47.28%
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	80	%	57.89	72.36%
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, obat, produk biologi dan sarana k	85	%	85.15	100.18%
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku obat, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persy	76	%	40.00	52.63%
		Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	77.2	%	95.24	123.37%
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru yang diterbitkan keput	85	%	67.86	79.84%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	100	%	33.33	33.33%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	100	%	100.00	100.00%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4.9	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	91.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	97.28	102.40%
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	86	%	63.52	73.86%
		Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	91	%	66.32	72.88%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	99.6	%	100.00	100.40%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100.00	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	100	%	86.00	86.00%
1.12	Registrasi Obat	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	90.75	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat	4.8	Indeks	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	92.54	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	91.3	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.96	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persen pengaduan/keluhan/ masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100	%	100.00	100.00%
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	82	%	81.12	98.93%
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100.00	100.00%
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	78	%	73.53	94.27%
		Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	90	%	89.17	99.08%
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	90	%	75.00	83.33%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	100	%	100.00	100.00%
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmeti	89.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan P	4.85	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	91.74	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	93.14	Indeks	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.55	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan	90	%	95.47	106.08%
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisi	90	%	90.39	100.43%
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang disel	83.5	%	89.94	107.71%
		Persentase OT, SK dan Kos yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93	%	83.88	90.19%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pratinik/KI	82	%	91.09	111.09%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan	90	%	92.01	102.23%
		Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	100	%	86.00	86.00%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang Standardisasi Obat Tradisional, Supleme	90.25	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.6	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.45	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesional ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92.14	Indeks	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91.51	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.7	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kese	99	%	99.00	100.00%
		Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada	95	%	78.95	83.11%
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan y	100	%	63.00	63.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan	100	%	100.00	100.00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	85.68	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4.9	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	91.6	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86.94	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	96	%	73.33	76.39%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan te	95	%	100.00	105.26%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	92	%	96.52	104.91%
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	97	%	51.45	53.04%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	%	75.00	75.00%
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang standardisasi ONPPZA	85.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	93.79	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik Direktorat Standardisasi ONPPZA	4.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	90.35	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	91.79	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.8	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholder yang efektif	95	%	-	Akhir Tahun
		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	95.5	%	63.24	66.22%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	%	95.00	95.00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	91.75	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4.9	Indeks	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	91.65	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92.6	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	260	Kader/fasilitator	160.00	61.54%
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	380	Kab/Kota	40.00	10.53%
		Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	980	Kader/fasilitator	900.00	91.84%
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	574	Pemda	120.00	20.91%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman	74	%	34.61	46.77%
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	40	%	50.00	125.00%
		Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan makanan	99.2	%	23.00	23.19%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	90	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	96	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94	%	75	79.79%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	96.25	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4.95	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	90.79	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB PPPOMN	91.89	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	85.25	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93.23	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.53	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	%	53.74	53.74%
		Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	100	%	93.89	93.89%
		Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	100	%	93.00	93.00%
		Persentase laboratorium Balai Besar / Balai POM sesuai standar Kemampuan Laboratorium	91.18	%	-	Akhir Tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	100	%	94.94	94.94%
		Persentase Pemenuhan grand desain penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan	40	%	35.00	87.50%
		Persentase Pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	87.96	%	87.72	99.73%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	%	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Persentase sampel Obat yang ditindaklanjuti tepat waktu	98	%	99.16	101.18%
		Persentase Status Akreditasi	100	%	86.00	86.00%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	3	%	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	86	%	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	68.8	%	-	Akhir Tahun
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	70	%	71.13	101.61%
		Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat d	58	%	42.81	73.81%
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	92	%	21.92	23.83%
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian	70	Indeks	30.00	42.86%
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	55	Indeks	50.00	90.91%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	90	Indeks	50.00	55.56%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	92	%	100.00	108.70%
1.20	Analisis Kebijakan di bidang Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan internal terhadap Layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	4	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92	Indeks	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92.2	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	82.76	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	89.65	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	78.8	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	86	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.9	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	84.5	%	-	Akhir Tahun
		Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100.00	100.00%
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	98	%	75.18	76.71%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat Keberhasilan Koordinasi Dalam Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	89	%	88.97	99.97%
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usa	93.75	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4.7	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradi	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Supl	91.44	Indeks	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	89.2	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK,	294	Kader/fasilitator	159.00	54.08%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	95	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar	100	%	22.49	22.49%
		Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan,	97.11	%	32.31	33.27%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan	85	%	30.00	35.29%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	87.5	%	20.00	22.86%
		Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masy	91.67	%	40.00	43.63%
		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos, dan SK	99.2	%	98.75	99.55%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan	99	%	37.28	37.66%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	87.96	103.48%
		Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	80	%	79.20	99.00%
		Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	88.77	104.44%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	90	%	95.90	106.56%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	78.4	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86.9	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2.5	Indeks	3.00	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	90	%	75.00	83.33%
B.	Program Dukungan Manajemen					
		Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	36	Nilai	-	Akhir Tahun
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	-	Akhir Tahun
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	62.25	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	96	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Media	77.13	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	81.00	Indeks	-	Akhir Tahun
		Persentase kerjasama yang efektif	90	%	42.04	46.71%
		Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	4.00	Indeks	-	Akhir Tahun
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3.89	Indeks	3.88	99.74%
		Indeks kepuasan media	77.13	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks opini publik BPOM	85.1	Indeks	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Biro Kerja Sama dan Humas	3	Indeks	2.50	83.33%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	85.2	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	86.32	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama	2	Negara	1.00	50.00%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.41	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	88	%	72.19	82.03%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	%	40.13	44.59%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.86	%	99.90	100.04%
		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	90	%	43.97	48.86%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	80	%	71.79	89.74%
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	98.6	%	100.00	101.42%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	100	%	95.00	95.00%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3.85	Indeks	3.66	95.06%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	3	Indeks	2.25	75.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	88.7	Indeks	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja	62.25	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93.23	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	91.9	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	96.15	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan	200	%	50,0	25.00%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan an	92	%	74.20	80.65%
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100	%	50.00	50.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	100.00	100.00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3.85	Indeks	3.87	100.52%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	95.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik	4.95	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	87.71	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	94.04	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Reformasi Hukum	96.4	Indeks	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	3	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.55	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPOM	4	Nilai	4.21	105.28%
		Persentase advokasi hukum yang ditindaklanjuti	100	%	100.00	100.00%
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.69	%	99.10	99.41%
		Persentase Peraturan Perundang-undangan yang disusun	100	%	100.00	100.00%
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	98	%	-	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	-	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	97	%	97.23	100.24%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	96	%	97.23	101.28%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Biro SDM	3.5	Indeks	3.56	101.71%
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.2	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Biro SDM yang Optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	89.12	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro SDM	92.28	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Sistem Merit	0.95	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan		%	-	Akhir Tahun
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	80	%	67.97	84.96%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	98	%	99.91	101.95%
		Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital yang Diimplementasikan Sesuai Perencanaan	94	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	80	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	%	90.00	90.00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	77	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik	3.35	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	88.64	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK	67.14	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	91.7	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar	1000	SDM	576.00	57.60%
		Nilai AKIP PPSDM POM	80.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM	4.5	Nilai	4.65	103.33%
		Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4.65	Nilai	4.74	101.94%
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	91.83	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	70	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	Nilai	-	Akhir Tahun
		Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	100	%	64.71	64.71%
		Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	98.95	%	100.00	101.06%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK	100	%	50.00	50.00%
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSPDM POM	65.5	%	28.20	43.05%
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	83	%	81.43	98.11%
		Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkatkan pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	95	%	-	Akhir Tahun
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team)	4.6	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3.5	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	89.63	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86.1	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks SPBE Badan POM	4.1	Indeks	-	Akhir Tahun
		Jumlah Data Berbagi Pakai	30	Data	15.00	50.00%
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	90.25	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	87	Nilai	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.5	Nilai	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	55.56	55.56%
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	98.5	%	98.59	100.09%
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	75	%	63.10	84.13%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	51.80	51.80%
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastuktur, Data dan Keamanan	100	%	85.92	85.92%
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	69.22	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	100	%	97.35	97.35%
		Sertifikasi ISO 27001	1	Sertifikat	-	Akhir Tahun
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86.3	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I	86	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat I yang optimal	3	Level	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	91.25	%	81.48	89.29%
		Indeks reformasi birokrasi Inspektorat I	86.7	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3.6	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3.85	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	97.5	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Survei Penilaian Integritas	83.48	%	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99.01	%	-	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	100.00	100.00%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100	%	70.00	70.00%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97.57	%	94.44	96.79%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM	94	%	-	Dimulai TW III
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	96	Indeks	96.50	100.52%
		Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	30	Indeks	-	Akhir Tahun
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	92	Indeks	75.00	81.52%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86.3	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II	86	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II yang optimal	3	Level	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	94.84	%	83.68	88.23%
		Indeks reformasi birokrasi Inspektorat II	86.7	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.75	Indeks	-	Akhir Tahun
		Nilai evaluasi Kapabilitas APIP	3.6	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM	3.85	%	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	95.79	%	-	Akhir Tahun
		Nilai Survei Penilaian Integritas	83.48	%	-	Akhir Tahun
		Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99.01	%	-	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100.00	100.00%
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100	Indeks	83.33	83.33%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97.57	Indeks	94.44	96.79%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM	94	%	-	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	96	Indeks	95.96	99.96%
		Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	30	%	-	Akhir Tahun
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	92	%	75.00	81.52%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.81	Nilai	3.55	93.18%
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	90	Nilai	-	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	3.42	Indeks	-	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	3	Indeks	3.00	100.00%
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	85.9	Persen	-	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Umum	90.48	Persen	-	Akhir Tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	85	Persen	-	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi s.d. Triwulan II	Capaian (%)
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	94	Level	-	Akhir Tahun
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	92.5	Persen	91.38	98.79%
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencana	100	Indeks	64.00	64.00%
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	95	Indeks	77.00	81.05%
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	100	Indeks	65.00	65.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100	%	80.00	80.00%



LAMPIRAN II

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN UNIT PUSAT

No.	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	7.571.062.000	7.571.062.000	4.658.366.214	61,53%	61,53%
2	DIT. STANDARDISASI OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	8.581.043.000	8.186.009.000	4.928.464.735	57,43%	60,21%
3	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	6.990.035.000	6.697.994.000	3.907.429.216	55,90%	58,34%
4	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	49.458.463.000	47.212.254.000	24.743.212.550	50,03%	52,41%
5	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	245.252.303.000	244.719.704.000	126.937.405.743	51,76%	51,87%
6	INSPEKTORAT I	19.857.121.000	19.274.329.000	9.932.574.058	50,02%	51,53%
7	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	69.691.863.000	66.924.758.000	33.991.589.621	48,77%	50,79%
8	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8.892.210.000	8.592.210.000	4.274.263.316	48,07%	49,75%
9	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	11.356.263.000	10.917.185.000	5.376.464.562	47,34%	49,25%
10	DIT. CEGAH TANGKAL	9.689.342.000	9.235.337.000	4.244.849.622	43,81%	45,96%
11	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	7.959.485.000	7.688.344.000	3.484.893.227	43,78%	45,33%
12	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	10.485.788.000	10.107.503.000	4.579.530.237	43,67%	45,31%
13	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN. MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT. NARKOTIKA. PSIKOTROPIKA. PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	14.943.811.000	14.229.163.000	6.356.414.566	42,54%	44,67%
14	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN	17.440.050.000	16.690.211.000	7.430.417.030	42,61%	44,52%
15	DIT. REGISTRASI OBAT	11.625.179.000	11.291.433.000	4.916.725.954	42,29%	43,54%
16	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	16.437.254.000	15.624.094.000	6.739.361.488	41,00%	43,13%

No.	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
17	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	51.950.013.000	49.635.141.000	21.082.387.908	40,58%	42,47%
18	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	11.391.066.000	10.968.241.000	4.647.686.052	40,80%	42,37%
19	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL. SUPLEMEN KESEHATAN. DAN KOSMETIK	12.351.840.000	11.728.186.000	4.953.709.919	40,11%	42,24%
20	BIRO KERJASAMA	16.393.512.000	15.407.303.000	6.465.804.295	39,44%	41,97%
21	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	12.382.354.000	12.230.987.000	5.129.984.725	41,43%	41,94%
22	DIT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	16.062.893.000	15.352.673.000	6.406.302.509	39,88%	41,73%
23	DIT. SIBER OBAT DAN MAKANAN	10.199.329.000	9.659.082.000	4.026.610.509	39,48%	41,69%
24	BIRO UMUM	124.705.888.000	114.452.015.000	46.153.922.944	37,01%	40,33%
25	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	9.515.134.000	8.954.901.000	3.607.307.552	37,91%	40,28%
26	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	14.959.391.000	14.289.702.000	5.705.965.362	38,14%	39,93%
27	PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	18.738.978.000	17.816.155.000	6.817.462.765	36,38%	38,27%
28	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	21.247.974.000	20.329.370.000	7.773.497.568	36,58%	38,24%
29	INSPEKTORAT II	7.836.110.000	7.419.109.000	2.470.425.088	31,53%	33,30%
30	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	8.130.472.000	7.859.942.000	2.593.115.257	31,89%	32,99%

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR/BALAI POM

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	34.886.550.000	30.079.358.000	18.925.472.183	54,25%	62,92%
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	42.007.580.000	39.593.032.000	22.596.128.639	53,79%	57,07%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	65.317.983.000	60.149.475.000	33.812.893.977	51,77%	56,21%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	28.463.787.000	25.840.248.000	14.238.608.639	50,02%	55,10%
5	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	29.541.984.000	28.867.474.000	15.781.653.129	53,42%	54,67%
6	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	26.935.521.000	20.973.638.000	11.437.940.377	42,46%	54,53%
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	30.880.170.000	30.178.401.000	16.413.458.473	53,15%	54,39%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	64.132.894.000	61.373.107.000	33.182.368.767	51,74%	54,07%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	35.273.134.000	34.560.761.000	18.494.901.169	52,43%	53,51%
10	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	49.578.166.000	48.178.166.000	24.737.741.800	49,90%	51,35%
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	44.028.712.000	42.050.392.000	21.531.394.638	48,90%	51,20%
12	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	26.593.219.000	26.089.289.000	13.327.032.237	50,11%	51,08%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	33.032.442.000	28.484.858.000	14.302.503.199	43,30%	50,21%
14	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	20.561.786.000	16.898.430.000	8.061.332.746	39,21%	47,70%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	33.322.757.000	33.322.757.000	15.895.194.447	47,70%	47,70%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	29.029.899.000	27.260.992.000	12.952.779.154	44,62%	47,51%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	24.933.735.000	23.574.544.000	11.150.258.192	44,72%	47,30%
18	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	26.762.674.000	26.005.967.000	12.139.011.597	45,36%	46,68%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	31.488.688.000	30.133.659.000	14.029.669.287	44,55%	46,56%
20	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	51.319.096.000	49.657.922.000	23.072.440.883	44,96%	46,46%
21	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	31.012.982.000	27.155.293.000	12.593.979.035	40,61%	46,38%
22	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	39.715.969.000	36.025.479.000	16.551.433.849	41,67%	45,94%
23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	29.803.431.000	28.317.211.000	12.780.894.872	42,88%	45,13%
24	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	46.364.718.000	43.783.669.000	19.714.668.955	42,52%	45,03%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	73.956.636.000	69.675.940.000	31.364.013.523	42,41%	45,01%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	19.931.864.000	18.233.876.000	8.202.078.459	41,15%	44,98%
27	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR	10.922.419.000	10.734.581.000	4.687.702.879	42,92%	43,67%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	35.314.386.000	33.659.478.000	14.620.826.335	41,40%	43,44%
29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	26.396.633.000	25.422.244.000	11.014.828.785	41,73%	43,33%
30	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	50.086.656.000	44.923.934.000	19.289.065.849	38,51%	42,94%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	15.988.031.000	13.905.603.000	5.938.151.946	37,14%	42,70%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALOPO	10.409.364.000	9.737.832.000	3.916.224.812	37,62%	40,22%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURAKARTA	9.867.975.000	9.687.955.000	3.886.259.352	39,38%	40,11%
34	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	35.567.261.000	16.837.584.000	6.744.160.819	18,96%	40,05%
35	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	32.006.163.000	28.631.222.000	10.709.414.063	33,46%	37,40%
36	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TANGERANG	10.641.335.000	10.407.967.000	3.837.076.890	36,06%	36,87%
37	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	30.912.619.000	29.702.333.000	10.212.762.747	33,04%	34,38%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
38	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	37.619.571.000	34.315.531.000	11.620.367.346	30,89%	33,86%
39	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA	10.893.401.000	10.722.478.000	3.405.069.687	31,26%	31,76%
40	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KEDIRI	10.982.280.000	10.341.972.000	3.260.068.508	29,68%	31,52%
41	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JEMBER	8.912.798.000	8.231.020.000	2.591.638.866	29,08%	31,49%
42	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PAYAKUMBUH	20.307.443.000	20.107.251.000	3.485.165.168	17,16%	17,33%

PERINGKAT REALISASI ANGGARAN LOKA POM

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
1	LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	5.681.839.000	4.595.674.000	3.045.122.180	53,59%	66,26%
2	LOKA POM DI KABUPATEN ENDE	7.901.955.000	7.453.167.000	4.648.240.395	58,82%	62,37%
3	LOKA POM DI KABUPATEN TANAH BUMBU	12.795.089.000	4.214.088.000	2.598.247.876	20,31%	61,66%
4	LOKA POM DI ACEH TENGAH	4.851.156.000	4.748.313.000	2.577.328.472	53,13%	54,28%
5	LOKA POM DI KABUPATEN BELITUNG	4.537.055.000	4.053.046.000	2.169.396.363	47,82%	53,53%
6	LOKA POM DI KOTA DUMAI	6.517.731.000	5.036.398.000	2.685.831.890	41,21%	53,33%
7	LOKA POM DI KABUPATEN MERAUKE	4.590.806.000	4.501.643.000	2.387.936.224	52,02%	53,05%
8	LOKA POM DI KABUPATEN REJANG LEBONG	4.801.300.000	4.711.436.000	2.489.753.971	51,86%	52,84%
9	LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	5.288.116.000	5.149.356.000	2.686.799.479	50,81%	52,18%
10	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	4.648.777.000	4.528.295.000	2.342.682.570	50,39%	51,73%
11	LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS	6.596.812.000	6.047.269.000	3.115.452.392	47,23%	51,52%
12	LOKA POM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	4.421.627.000	4.318.465.000	2.217.695.700	50,16%	51,35%
13	LOKA POM DI KOTA TANJUNGBALAI	4.076.674.000	3.992.345.000	2.027.668.547	49,74%	50,79%
14	LOKA POM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	5.476.746.000	4.848.614.000	2.457.364.800	44,87%	50,68%
15	LOKA POM DI KABUPATEN DHARMASRAYA	3.708.723.000	3.622.575.000	1.835.650.145	49,50%	50,67%
16	LOKA POM DI KOTA SUNGAI PENUH	4.290.101.000	4.181.417.000	2.108.191.378	49,14%	50,42%
17	LOKA POM DI KABUPATEN SANGGAU	4.364.947.000	4.225.444.000	2.065.324.905	47,32%	48,88%
18	LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI	4.207.261.000	4.111.871.000	1.993.129.808	47,37%	48,47%

NO	Unit Kerja	Pagu	Pagu Setelah AA	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Automatic Adjustment
19	LOKA POM DI ACEH SELATAN	4.534.266.000	4.412.981.000	2.136.157.712	47,11%	48,41%
20	LOKA POM DI KOTA BALIKPAPAN	5.919.745.000	4.804.589.000	2.307.372.125	38,98%	48,02%
21	LOKA POM DI KABUPATEN BIMA	4.931.885.000	4.795.033.000	2.300.992.277	46,66%	47,99%
22	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	4.930.663.000	4.806.461.000	2.303.386.544	46,72%	47,92%
23	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	4.497.759.000	4.401.155.000	2.102.958.122	46,76%	47,78%
24	LOKA POM DI KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4.037.999.000	3.943.922.000	1.882.031.732	46,61%	47,72%
25	LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	7.491.119.000	5.920.248.000	2.811.287.324	37,53%	47,49%
26	LOKA POM DI KABUPATEN TULANGBAWANG	4.713.791.000	4.181.918.000	1.967.595.649	41,74%	47,05%
27	LOKA POM DI KOTA TANJUNGPINANG	4.221.085.000	4.088.322.000	1.874.419.036	44,41%	45,85%
28	LOKA POM DI KOTA BAUBAU	6.921.404.000	6.215.079.000	2.790.716.246	40,32%	44,90%
29	LOKA POM DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT	5.441.410.000	4.775.791.000	2.097.892.485	38,55%	43,93%
30	LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG	15.985.780.000	5.089.943.000	2.223.259.914	13,91%	43,68%
31	LOKA POM DI KABUPATEN BANGGAI	4.137.387.000	4.025.637.000	1.683.639.265	40,69%	41,82%



KINERJA BPOM DALAM ANGKA

TRIWULAN II TAHUN 2024



Jln. Percetakan Negara Jakarta Pusat
10560



021 4244691



www.pom.go.id



halobpom@pom.go.id



[@bpom_ri](https://twitter.com/bpom_ri)



[Bpom RI](https://www.facebook.com/Bpom.RI)